DETERMINASI RASIO UTANG PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH MENURUT *WORLD BANK* TAHUN 2021

(Skripsi)

Oleh

Ghania Atiqasani

NPM 1811021010

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

DETERMINASI RASIO UTANG PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH MENURUT *WORLD BANK* TAHUN 2021

OLEH

GHANIA ATIQASANI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh resiko gagal bayar tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal, dan *e-budgeting* terhadap resiko gagal bayar di negara berpendapatan menengah pada masa pemulihan perekonomian tahun 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data *cross section* di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko gagal bayar tahun sebelumnya dan korupsi secara signifikan berpengaruh positif terhadap resiko gagal bayar. Sementara itu, transparansi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap resiko gagal bayar. Pengeluaran pemerintah dan *e-budgeting* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap resiko gagal bayar di negara berpendapatan menengah tahun 2021. Dengan demikian, pengaruh pengeluaran pemerintah dan *e-budgeting* belum dapat digambarkan selama satu tahun berjalan sehingga diperlukan periode waktu yang lebih panjang. Sementara itu, resiko gagal bayar utang tahun sebelumnya, korupsi, dan transparansi fiskal merupakan instrument yang sangat berarti bagi resiko gagal bayar utang pada kurun waktu satu tahun berjalan, oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan yang mendasar guna meminimalisir terjadinya kebangkrutan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan membayar utang di 55 Negara Berpendapatan Menengah.

Kata Kunci: Rasio Utang Publik, Pengeluaran Pemerintah, Korupsi, Transparansi Fisikal, *E-Budgeting*

ABSTRACT

DETERMINATION OF PUBLIC DEBT RATIO IN MIDDLE-INCOME COUNTRIES ACCORDING TO THE WORLD BANK IN 2021

BY

GHANIA ATIQASANI

The purpose of this study is to determine the effect of default risk in the previous year, government spending, corruption, fiscal transparency, and e-budgeting on the risk of default in middle-income countries during the economic recovery period in 2021. The analysis method used in this study is a cross-section data regression analysis method in 55 middle-income countries in 2021. The results of this study show that the risk of default in the previous year and corruption significantly positively affects the risk of default. Meanwhile, fiscal transparency has a significant negative effect on default risk. Government spending and e-budgeting have a positive effect on the risk of default in middle-income countries in 2021. Thus, the influence of government spending and e-budgeting cannot be described for one year so a longer period of time is needed. Meanwhile, the risk of debt default in the previous year, corruption, and fiscal transparency are very meaningful instruments for the risk of debt default in the current one-year period, therefore it is necessary to have a fundamental role for the government in planning and management to minimize the occurrence of bankruptcies resulting from the inability to repay debts in 55 Middle Income Countries.

Keywords: Public Debt Ratio, Government Expenditure, Corruption, Fiscal Transparency, E-Budgeting

DETERMINASI RASIO UTANG PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH MENURUT *WORLD BANK* TAHUN 2021

Oleh

Ghania Atiqasani

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **DETERMINASI RASIO UTANG PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH MENURUT *WORLD BANK* TAHUN 2021**

Nama Mahasiswa : *Ghania Atiqasani*

No. Induk Mahasiswa : **1811021010**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nairobi, SE., M.Si.	**Arif Darmawan, S.E., M.A.**
NIP 19660621 199003 1 003	NIP 19900621 201903 1 010

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nairobi, S.E., M.Si.** .....

Penguji I : **Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.** .....

Penguji II : **Arif Darmawan, S.E., M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 November 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 November 2022
Penulis

GHANIA ATIQASANI

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ghania Atiqasani dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Juni 2000, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Ramli Sani dan Martini. Penulis memiliki dua kakak perempuan yang bernama Galih Cendana Nabilasani dan Galuh Orie Syamilasani.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal Taman Kanak-kanak di TKIT Qurrota A'yun Bandar Lampung pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan Dasar di SDIT Permata Bunda Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Mengengah Pertama sebagai alumni SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan dinyatakan lulus pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SNMPTN. Penulis memilih Ekonomi Publik dan Fiskal sebagai konsentrasi yang ditekuni. Selama menjadi mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa) FEB Unila dan aktif menjadi staf keilmuan dan penalaran pada tahun 2020. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Sekertaris Bidang Hubungan Masyarakat dan Kemediaan KSEI FoSEIL.

Pada tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Penulis sempat mengikuti beberapa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti Pertukaran Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Yogyakarta (UPNVY) tahun 2020 dan Progam Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) di PT. Great Giant Foods selama 6 bulan di tahun 2021. Selain itu, Penulis merupakan Bahasa Inggris Terbaik dalam kegiatan Mahasiswa Berprestasi tahun 2021. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonoharjo, Kabupaten Tanggamus tahun 2021 serta sering terlibat sebagai pembawa acara di beberapa kegiatan.

MOTTO

"but they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners."
(Qur'an 8:30)

"... seek help (from Allah) through patience and prayer. Surely, Allah is with the patient."
(Qur'an 2:153)

"Allah will raise up those of you who have faith and those of you who have knowledge, in ranks. And Allah is fully aware of whatever you do."
(Qur'an 58: 11)

"Everything in life has happened for you. Every disappointment. Every wrong. Even every closed door has helped make you into who you are."

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Sujud syukur kupersembahkan kepada Tuhanku Allah SWT atas segala karunia, rahmat, cinta, dan kasih sayang-Nya yang melimpah. Shalawat serta salam juga selalu kupanjatkan bagi suri tauladanku Nabi Muhammad S.A.W.

Dengan kerendahan hati, bersama keridhaan-Mu ya Allah, kupersembahkan karya kecil penuh cinta ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Ramli Sani

Martini

Terimakasih atas setiap bait doa, nasihat, dan pelukmu telah menghantarkan diriku menuju hari esok yang cerah. Mungkin tak pernah terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku sayang kalian. Tiada mungkin setiap pengorbanan dapat kubalas dengan apapun selain meminta kepada-Nya yang Kuasa posisi terbaik untuk Mama dan Papa di Jannah.

Untuk Kakakku, Galih Cendana Nabilasani dan Galuh Orie Syamilasani

Terimakasih atas doa dan dukungan yang senantiasa menemani serta memberikan warna tersendiri dalam tiap lembaran hidupkku.

Serta

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWANCANA

Bismillahirohmaanirrohiim,

Alhamdulillahirrobbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Determinasi Rasio Utang Publik di Negara-Negara Berpendapatan Menengah Menurut *World Bank* Tahun 2021"** Shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, penglaman, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta selaku dosen penguji yang senantiasa memberi pengarahan, kritik, saran, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang diberikan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembahas senantiasa memberi pengarahan, kritik, saran, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini..
6. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji Utama atas segala ilmu, saran, dukungan, kritik, dan masukannya sehingga mendorong penulis untuk menciptakan skripsi yang semakin baik.
7. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. dan Ibu Resha Moniyana, S.E., M.Si., selaku dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran sosial yang sangat jarang mahasiswa dapatkan di bangku kuliah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
11. Papa dan Mamaku tercinta, Bapak Ramli Sani dan Ibu Martini yang tiada hentinya mendoakan, melimpahkan kasih sayang, memberikan pembelajaran utama akan Allah, menuturkan kalimat-kalimat penyemangat agar anaknya menjadi pribadi yang baik dimata Allah dan ciptaannya. Tiap gores senyuman dan tetes pengorbanan yang keluar akan selalu anakmu ingat dan berdoa segalanya yang terbaik untuk Mama dan Papa di dunia dan akhirat nanti.
12. Kakak-kakakku tersayang dan paling kubanggakan, Galih Cendana Nabilasani yang selalu ada tiap waktu mendengarkan cerita dan keluh kesah, serta Galuh Orie Syamilasani yang selalu menemani dan keceriaannya mencerahkan hari-hari saudarinya ini.

13. Keluarga besar dari kedua belah pihak orangtuaku. Nek Ino, Atuh, Nisa/toyun, Abang, Bapak, Ibu, dan lainnya yang tak dapat kusebutkan satu persatu. Kiranya penyelesaian skripsi ini dapat menjadi kebanggaan untuk mereka semua. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, nasihat, serta semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Sahabat paling kusayang, Widia Anggi Palupi, Fajari Himannudin, dan Fakhri Rizal Husain. Terima kasih atas hari-hari penuh kebahagiaan dan suka cita, hiburannya dikala letih dan sedih, kalian salah satu potongan kisah terbaik yang mengisi hidup penulis. Jangan menyerah dan galau berkepanjangan menunggu seseorang itu datang, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Semoga Allah melancarkan jalan menuju cita-cita kita dan persahabatan ini tak lekang oleh waktu.
15. Sahabat sejak SMPku dan yang jauh disana, yang masing-masing telah melukiskan warna pelangi dalam hidupku yakni Zhaila, Adhe, Irene, Dista, dan Rara. Terima kasih atas pembelajaran hidup, motivasi, dan semangat juang yang kalian tularkan yang tak bisa dipungkiri kalian menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk pribadi penulis saat ini.
16. Sahabat-sahabat perjuangan dikampus tercinta, Glen, Acel, Citra, Nadiyah, Putri, Denisa, Priska, Budhi, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Jurusan Ekonomi Pembangunan 2018, dan juga teman-teman sekonsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal yang seringkali penulis repotkan. Terima kasih untuk semua suka, duka, motivasi, dukungan, nasihat, bantuan dan kesabaran kalian. Semoga Allah limpahkan rahmat dan kesuksesan untuk kita semua.
17. Teman-teman seperjuangan Program Magang MBKM 2021 di PT. Great Giant Foods, Lystia, Novry, Dea, Nyoman, Chyntia, Nia, Wenti, Abel, dan Wiwid dan teman-temanku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas cerita, kenangan, pengalaman dan kesabaran kalian selama enam bulan kebersamaan kita. Semoga sukses untuk kita semua.
18. Teman-teman KKN yang telah bekerjasama. Terima kasih atas suka duka kebersamaannya dalam keterbatasan selama 60 hari di Keluarahan Kota Sepang. Kalian luar biasa, kalian yang terbaik.

19. Keluarga besar Komunitas Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
20. *Dear self, thank you. You've been working hard for the past six months. Actually for the past several years, but let's not get ahead of ourselves. When everything came crashing down, you had a choice. Thank you for choosing to fight. Thank you for having the courage to look a little longer, push a little harder. I sincerely hope it pays off--and I think it will. Thanks for dreaming and actually believing that you are destined for something amazing. It's nice to know your anxiety hasn't taken over your positive and beautiful spirit.*

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.
Aamiin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, 23 Novermber 2022
Penulis

Ghania Atiqasani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 20
1.4 Manfaat Penelitian 21

II. TINJAUAN PUSTAKA **22**
2.1 Tinjauan Teoritis 22
2.1.1 *Public Finance Theory* 22
2.1.2 *Government Trust* 23
2.1.3 Utang Publik 24
2.1.3.1 Pengertian Utang Publik 24
2.1.3.2 Teori Utang Ponzi 26
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah 28
2.1.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah 28
2.1.4.2 Pandangan Keynesian 29
2.1.4.3 Pandangan Klasik 29
2.1.4.4 *Paradox of Debt* 30
2.1.5 *Good Governance Principle* 31
2.1.6 Korupsi 33
2.1.6.1 Pengertian Korupsi 33
2.1.6.2 *Sand the Wheels Hypothesis* 34
2.1.7 Transparansi Fiskal 34
2.1.7.1 Pengertian Transparansi Fiskal 34
2.1.7.2 Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*) 35
2.1.8 *E-Budgeting* 36
2.2 Tinjauan Empiris 37
2.3 Kerangka Pemikiran 39
2.4 Hipotesis 41

III. METODOLOGI PENELITIAN 42
3.1 Ruang Lingkup dan Jenis Data 42
3.2 Definisi Operasional Variabel 43
3.2.1. Rasio utang publik 43
3.2.2. Pengeluaran Pemerintah 43
3.2.3. Korupsi 44
3.2.4. Transparansi Fiskal 44
3.2.5. *E-Budgeting* 45
3.3 Metode Analisis 45
3.4 Prosedur Analisis Data 46
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 46
3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik 46
3.4.3 Pengujian Hipotesis 50
3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2) 53

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 54
4.1 Analisis Statistik Deskriptif 54
4.2 Hasil Pengujian Regresi Data *Cross Section* 61
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 61
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data *Cross Section* 64
4.2.3 Pengujian Hipotesis 65
4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2) 69
4.2.5 Adjusted R-squared ($\bar{R}^2$) 69
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 69
4.3.1 Pengaruh Rasio Utang Publik Tahun Sebelumnya terhadap Rasio Utang Publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 71
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Rasio Utang Publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 74
4.3.3 Pengaruh Korupsi terhadap Rasio Utang Publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 77
4.3.4 Pengaruh Transparansi Fiskal terhadap Rasio Utang Publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 79
4.3.5 Pengaruh *E-Budgeting* terhadap Rasio Utang Publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 82

V. KESIMPULAN DAN SARAN 86
5.1 Kesimpulan 86
5.2 Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 98

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Klasifikasi Ekonomi Negara berdasarkan GNI per-kapita..... 1

2. Negara dengan Rasio Utang Publik diatas Ambang Batas 5

3. Klasifikasi Transparansi Fiskal 35

4. Ringkasan Tinjauan Empiris 37

5. Ringkasan Variabel Penelitian 42

6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian..... 54

7. Nilai dan Peringkat Negara Mesir dan Comoros 59

8. Hasil Deteksi Multikolinieritas, Correlation 62

9. Hasil Regresi Uji Breusch Pagan Godfrey..... 63

10. Hasil Regresi Uji Breusch Pagan Godfrey..... 64

11. Hasil Estimasi Regresi Data *Cross Section*..... 65

12. Hasil Uji Parsial (Uji t) 66

13. Hasil Uji Simultan (Uji F)..... 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021 4

2. Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun sebelumnya 6

3. Hubungan Rasio utang publik tahun 2021 dan Rasio utang publik tahun sebelumnya di 55 Negara Berpendapatan Menengah 7

4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 9

5. Indeks Presepsi Korupsi 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 .. 11

6. Hubungan Korupsi dan Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 12

7. Transparansi Fiskal 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 15

8. Hubungan Transparansi Fiskal dan Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 17

9. Persentase Ketersediaan Sistem *E-Budgeting* di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021 19

10. Kerangka Pemikiran..... 40

11. Daerah Keputusan Uji Durbin Watson (DW) 49

12. Negara dengan Rasio utang publik Tertinggi tahun 2021 (kiri) dan Negara dengan Rasio utang publik tahun 2021 Terendah (kanan)..... 55

13. Negara dengan Rasio utang publik tahun sebelumnya Tertinggi (kiri) dan Negara dengan Rasio utang publik tahun sebelumnya Terendah (kanan)..... 56

14. Negara dengan Pengeluaran Pemerintah Tertinggi (kiri) dan Negara dengan Pengeluaran Pemerintah Terendah (kanan) 57

15. Negara dengan Indeks Presepsi Korupsi Tertinggi (kiri) dan Negara dengan Indeks Presepsi Korupsi Terendah (kanan) 58

16. Negara dengan Indeks Transparansi Fiskal Tertinggi (kiri) dan Negara dengan Indeks Transparansi Fiskal Terendah (kanan) 58

17. Hasil Uji Normalitas. 62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis, *World Bank* melakukan pengklasifikasian negara berdasarkan kelas ekonomi yang dikategorikan menjadi tiga kategori: pendapatan tinggi (*High Income*), pendapatan menengah (*Middle Income*), dan pendapatan rendah (*Low Income*). Seiring dengan perkembangannya, klasifikasi ekonomi ditentukan lebih lanjut dengan memecah negara berpendapatan menengah menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu: negara-negara berpendapatan menengah ke atas (*Upper-Middle Income*) dan negara berpendapatan menengah ke bawah (*Lower-Middle Income*). Hal tersebut disebabkan ekonomi berpenghasilan menengah memiliki keberagaman wilayah, ukuran, populasi, dan tingkat pendapatan. Indikator yang digunakan dalam melakukan pengelompokkan ekonomi negara oleh *World Bank* adalah GNI per-kapita (dalam USD) yang dikonversi dengan menggunakan metode Atlas dari rata-rata pergerakan tiga tahun nilai tukar. Adapun klasifikasi ekonomi negara-negara oleh *World Bank* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Ekonomi Negara berdasarkan GNI per-kapita

Kelompok	**1 Juli, 2021 (dollar AS)**	**1 Juli, 2020 (dollar AS)**
Low income	< 1,046	<1,035
Lower-middle income	1,046 – 4,095	1,035 – 4,045
Upper-middle income	4,096 – 12,695	4,046 – 12,535
High income	> 12,695	> 12,535

Sumber : World Bank, 2021

Diantara kelompok-kelompok ekonomi negara tersebut, negara-negara berpendapatan menengah (MICs) memiliki populasi gabungan lima miliar, atau lebih dari 70% populasi di dunia dan 73% diantaranya merupakan kelompok

yang kurang beruntung secara ekonomi. Negara-negara berpenghasilan menengah mewakili sekitar sepertiga dari PDB global dan penting untuk pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan negara berpenghasilan menengah, menurut *World Bank*, memiliki efek riak positif pada negara-negara lain seperti perdagangan internasional, pengurangan konflik perbatasan, pembangunan energi berkelanjutan, dan ketahanan pangan dan air.

Disisi lain, negara-negara berpendapatan menengah dihadapi permasalahan terkait dengan peran serta pemerintahan dan lembaga publik lainnya baik dalam penyusunan kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya fiskal, hingga realisasi hak asasi manusia yang seharusnya bebas dari penyalahgunaan kedudukan pemangku kebijakan terkait. Akibatnya, tidak sedikit negara mengalami ketidakpastian mengenai situasi nyata dari akun publik sehingga mendorong terciptanya keraguan dan konflik diantara masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menghadapi flluktuasi perekonomian global, yang diantaranya digambarkan melalui beberapa krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara berpendapatan menengah. Krisis Meksiko 1994-1995 dan krisis pasar negara berkembang 1997-1998 menunjukkan kelemahan yang serius pada peran pemerintah dalam perumusan dan pelaksanakan kebijakan untuk mengatasi kelesuan perekonomian yang berakhir pada pembengkakan utang yang tidak dapat terbayarkan.

Saat ini, dunia harus kembali menghadapi krisis perekonomian global yang disebabkan melalui adanya penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020 silam. Meskipun sektor ekonomi bukanlah menjadi akar permulaan krisis terjadi, adanya *multiplier effect* menyebabkan permasalahan dari sektor kesehatan dapat menciptakan permasalahan baru pada sektor ekonomi. Secara sederhana, eksistensi COVID-19 menghambat mobilitas dan produktivitas menciptakan perlambatan dalam pergerakkan roda perekonomian. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan tekanan fiskal dalam skala global tanpa terkecuali, Yaechan (2021) melalui laman resmi *Boston University Global Development Policy Center* memaparkan bahwa tak sedikit negara berpenghasilan menengah (*Middle Income Countries*) telah diabaikan, pasalnya negara-negara berpendapatan tinggi (*High-*

Income), telah mampu mengatasi norma baru berkat ruang fiskal dan kebijakan yang relatif lebih besar dan sekarang mengantisipasi pemulihan ekonomi yang kuat. Sedangkan negara-negara berpenghasilan rendah (*Low Income*) telah dianggap paling rentan secara finansial terhadap tekanan ini dan komunitas internasional berusaha untuk menutupi kekhawatiran yang dihadapi negara-negara berpendapatan rendah.

Meskipun skala permintaan agregat negara berpendapatan menengah lebih tinggi untuk dukungan keuangan mengingat ukuran ekonomi mereka yang lebih besar dibandingkan dengan negara berpenghasilan rendah, akan tetapi atensi negara berpendapatan menengah cenderung bias. Akibatnya, keringanan utang yang dicanangkan saat ini membuat negara berpendapatan menengah rentan terhadap potensi krisis utang luar negeri seiring dengan pemulihan ekonomi global. Avinash Persaud (dalam Yaechan, 2021), pada forum yang dilaksanakan oleh *Boston University Global Development Policy Center* dan ISPI (*Italian Institute for International Political Studies*), lebih rinci menjelaskan bahwa globalisasi telah menyatukan negara-negara tetapi secara bersamaan mengungkapkan perbedaan yang lebih besar di antara mereka. 'Kesenjangan besar' ini terbukti dalam bagaimana hampir 90 persen ekspansi fiskal yang dihasilkan sebagai bagian dari respons pandemi telah terjadi di negara maju. Negara-negara berkembang, meskipun populasinya lebih besar, hanya menikmati 10 persen dari kebijakan ekspansif. Dengan kata lain, negara-negara yang paling parah terkena dampaknya tidak dapat memanfaatkan ruang fiskal yang dinikmati oleh negara-negara maju.

Secara tidak langsung situasi kelesuan perekonomian global saat ini mengharuskan beberapa negara untuk meningkatkan sumber penerimaannya melalui utang publik demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian di masing-masing negara. Namun, sangat penting bagi pemerintah untuk dapat terus membayar utang publik dan mengatahui bahwa beban utang dapat berdampak secara berkelanjutan. Umumnya, kemampuan suatu negara dalam membayar utang publik dapat dilihat melalui rasio utang publik. Rasio utang publik yang tinggi yang dapat mengancam stabilitas makro-

ekonomi dan menyebabkan perlu adanya pengaturan kembali pembangunan suatu negara selama bertahun-tahun. Dengan demikian, bagaimana kemampuan negara-negara berpendapatan menengah untuk membayar kewajiban utang yang telah dilakukan merupakan salah satu hal komponen penting dalam perumusan kebijakan publik dan fiskal.

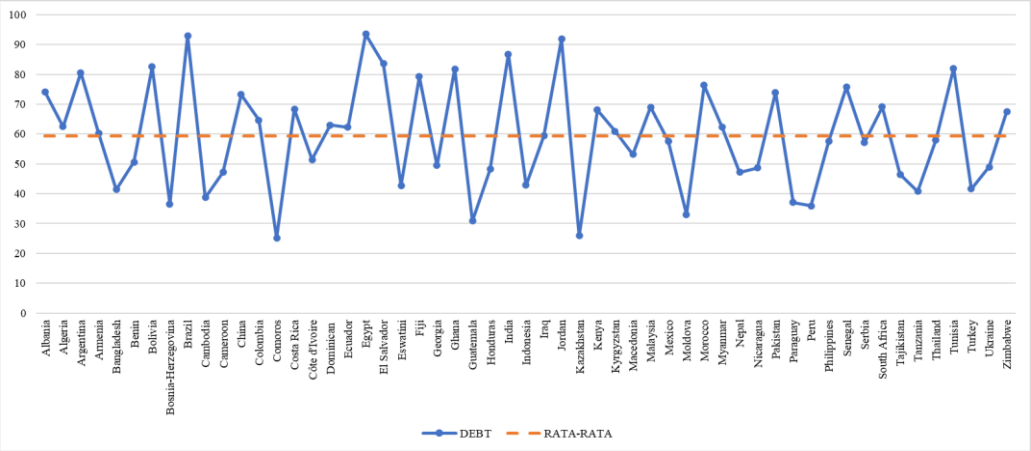

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund, 2022
Gambar 1. Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021

Berdasarkan data rasio utang publik yang dipublikasikan oleh IMF (2022), diketahui bahwa 52 persen dari negara berpendapatan menengah memiliki rasio utang publik diatas rata-rata. Dengan kata lain, hampir setengah dari negara berpendapatan menengah memiliki resiko gagal bayar utang yang cukup tinggi. Tingkat rasio utang publik yang tinggi di negara-negara berpendapatan menengah menunjukkan rendahnya kemungkinan atau kemampuan negara untuk dapat membayar utangnya.

Tingkat rasio utang negara Mesir merupakan tingkat rasio utang publik tertinggi, dimana memiliki angka nyaris mendekati 100 persen. Dilansir dalam (Ismail, 2022), fenomena yang terjadi pada Mesir merupakan gambaran permasalahan yang mencengkeram negara-negara miskin di balik lonjakan inflasi, peningkatan hasil panen, dan penurunan pertumbuhan global. Probabilitas pemerintahnya akan gagal membayar utang dalam satu tahun telah melonjak ke level tertinggi sejak 2013, dan menjadi yang terburuk di kawasan Afrika Utara. Pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun, dan puluhan juta masyarakat Mesir akan

menanggung beban karena harga yang akan melonjak. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Springborg (2022) pinjaman IMF ke Mesir sejak 2016 secara signifikan lebih tinggi daripada kuota IMF, dan karenanya dikenakan biaya tambahan suku bunga. Negara ini telah menjadi klien terbesar IMF setelah Argentina. Ekonom Mesir menyatakan keprihatinan bahwa sebagian besar utang akan digunakan untuk melayani utang atau akumulasi pembayaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Disisi lain, Caner et al. (2010) memaparkan terkait batas aman rasio utang publik suatu negara yang dikelompokkan berdasarkan indikator negara maju dan negara berkembang. Menurut Caner, ambang batas aman rasio utang untuk masing-masing negara maju dan negara berkembang adalah sebesar 64% dan 77%.

Tabel 2. Negara dengan Rasio Utang Publik diatas Ambang Batas

No	Negara	Keterangan	Rasio Utang	Ambang Batas
1	Brazil	Maju	93.013	77
2	Jordan	Maju	91.803	77
3	Fiji	Maju	79.181	77
4	Albania	Maju	74.206	77
5	Egypt	Berkembang	93.498	64
6	India	Berkembang	86.758	64
7	El Salvador	Berkembang	83.587	64
8	Bolivia	Berkembang	82.571	64
9	Tunisia	Berkembang	82.028	64
10	Ghana	Berkembang	81.806	64
11	Angola	Berkembang	80.617	64
12	Morocco	Berkembang	76.29	64
13	Senegal	Berkembang	75.721	64
14	Pakistan	Berkembang	73.96	64
15	China	Berkembang	73.254	64
16	Kenya	Berkembang	68.1	64
17	Zimbabwe	Berkembang	67.565	64

Sumber: IMF, World Economic Outlook, 2022

Jika dibandingkan dengan ambang batas aman yang dipublikasikan oleh Caner et al. (2010). Maka diketahui diantara total 55 negara berpendapatan menengah, 17 diantaranya memiliki resiko gagal bayar berada diatas ambang batas aman. Nilai

rasio tersebut dapat menyebabkan kegagalan pemerintah nasional untuk membayar utangnya. Jika suatu negara dinyatakan bangkrut, maka kemungkinan akan menghalangi negara mengakses pasar utang lagi selama bertahun-tahun, dan membuat pinjaman lebih mahal, setidaknya untuk sementara waktu, ketika hal itu dimungkinkan lagi. Pemberi pinjaman memiliki jalan yang terbatas jika terjadi gagal bayar utang negara karena tidak ada pengadilan internasional yang dapat memaksa suatu negara untuk membayar, meskipun mereka dapat mengajukan klaim atas aset peminjam yang gagal bayar di luar negeri.

Ketika suatu negara memiliki jumlah hutang yang berlebihan dan tidak dapat meminjam lebih banyak modal, negara tersebut dikatakan dalam debt overhang. Bebannya begitu besar sehingga setiap dan semua pendapatan langsung digunakan untuk melunasi hutang yang ada daripada mendanai proyek investasi baru, membuat potensi gagal bayar lebih tinggi. Dalam kebanyakan kasus, pemegang saham mungkin enggan menyetujui penerbitan saham baru karena pemegang saham mungkin terancam kerugian. Tunggakan utang juga berlaku untuk pemerintah yang berdaulat. Dalam kasus ini, istilah tersebut mengacu pada situasi di mana utang suatu negara melebihi kapasitasnya di masa depan untuk membayarnya. Hal ini dapat terjadi dari kesenjangan output atau setengah pengangguran ekonomi, berulang kali tersumbat oleh penciptaan kredit tambahan. Tumpang tindih utang dapat menyebabkan pertumbuhan yang stagnan dan penurunan standar hidup dari pengurangan dana menjadi pengeluaran di bidang-bidang penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

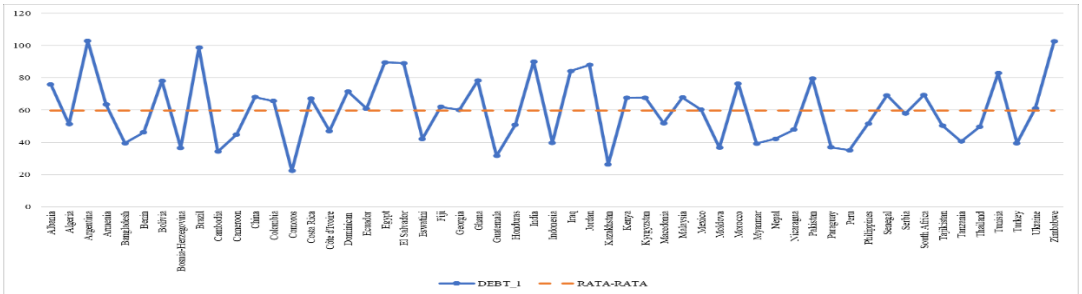

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund, 2022

Gambar 2. Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun sebelumnya

Jika dilihat kilas balik rasio utang publik tahun sebelumnya, diketahui bahwa 53% dari sampel 55 negara berpendapatan menengah mengalami peningkatan rasio utang publik pada periode waktu 2020 – 2021. Peningkatan rasio utang publik yang terjadi ditahun 2021 dapat disebabkan oleh peningkatan utang publik, penurunan GDP akibat dari perlambatan roda perekonomian, atau keduanya yang terjadi secara bersama-sama. Disisi lain meski belum dapat dinyatakan sebagai endemi, pada tahun 2021 terdapat negara-negara berpendapatan menengah mulai melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi sehingga 47% dari 55 negara berpendapatan menengah mengalami penurunan dalam rasio utang publik.

Resiko gagal bayar utang pada tahun sebelumnya, secara individu antara negara-negara berpendapatan menengah masih cenderung dapat dikatakan tergolong tinggi. Utang publik yang tinggi dapat berdampak negatif pada akumulasi stok modal dan pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan suku bunga dalam jangka panjang, tingkat pajak distorsi yang lebih tinggi, inflasi, dan kendala umum pada kebijakan fiskal *countercyclical*, yang pada selanjutnya dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Dengan kata lain, akumulasi utang pada tahun sebelumnya dapat berdampak peningkatan utang pada tahun berjalan yang disebabkan penambahan beban biaya yang harus dibayar salah satunya melalui suku bunga pinjaman.

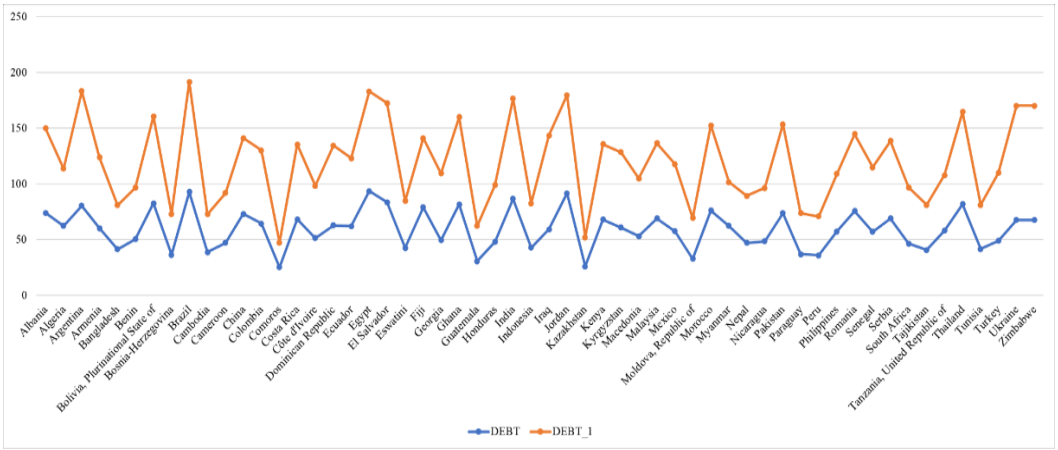

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund, 2022

Gambar 3. Hubungan Rasio utang publik tahun 2021 dan Rasio utang publik tahun sebelumnya di 55 Negara Berpendapatan Menengah

Berdasarkan gambar diatas, fluktuasi antara rasio utang publik tahun sebelumnya sejalan dengan fluktuasi rasio utang publik tahun berjalan. Rasio utang publik tahun sebelumnya di negara berpendapatan menengah secara jelas terlihat lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan rasio utang publik pada tahun 2021. Meskipun pada tahu 2021 beberapa negara mulai mengalami penurunan dalam rasio utang publik, akan tetapi tidak dapat diartikan bahwa resiko terjadinya gagal bayar utang yang sempat terjadi di beberapa negara tidak mungkin dapat terulang. Masih tingginya persentase rasio utang publik tersebut, dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akumulasi utang pada tahun sebelumnya dan rendahnya tata kelola pemerintahan yang memungkinkan dapat memperburuk situasi perekonomian pada suatu negara.

Terciptanya spekulasi terkait pengaruh akumulasi utang pada tahun sebelumnya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi rasio utang publik berlandaskan pada pemikiran Hyman P. Minsky yang secara sederhana memaparkan bahwa semakin besar pelaku mengakumulasi utang, maka semakin besar risiko mengalami gagal bayar dan mekanisme ini terjadi secara alamiah (Prasetyantoko, 2010). Apabila berkaca dari krisis yang sempat terjadi, akumulasi utang sebelumnya yang cukup tinggi memiliki peran penting atas rasio utang publik suatu negara, beberapa pemerintahan disuatu negara merumuskan kebijakan yang mendorong terjadinya konsep “galing lubang, tutup lubang”. Sehingga berujung pada bangkrutnya suatu negara dengan utang yang tak terbayar.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah turut memberikan sumbangsih dalam pergerakan rasio utang publik. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga akan berdampak pada sisi penawaran ekonomi – tergantung pada bidang pengeluaran pemerintah mana yang meningkat. Jika pengeluaran difokuskan pada peningkatan infrastruktur, ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan pasokan agregat jangka panjang. Jika pengeluaran difokuskan pada tunjangan kesejahteraan atau pensiun, itu dapat mengurangi ketidaksetaraan, tetapi dapat mendorong investasi sektor swasta yang lebih produktif.

Secara sederhana, pengeluaran pemerintah dapat meningkatan dari sisi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran. Jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka dapat berdampak kepada peningkatan kemampuan suatu negara dalam melakukan pembayaran utang, sehingga resiko gagal bayar dapat menurun. Disisi lain, campur tangan pemerintah dalam melakukan peneluaran harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat, hal tersebut disebabkan dalam beberapa kasus alokasi sumber pendanaan pemerintah cenderung tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi kebanyakan masyarakat. Misalnya, salah satu isu yang terjadi di Indonesia dimana diberitakan dalam alokasi dana APBN digunakan untuk kepentingan yang tidak mendorong produktivitas salah satunya adalah terkait pemberitaan alokasi dana APBN untuk atribut ruangan di suatu gedung lembaga legislatif. Alih-alih mendorong perekonomian alokasi dana APBN tersebut justru menyebabkan kekhawatiran dan pergesekan antara masyarakat dengan pemerintahan yang berujung pada bentrok dan kerusakan barang publik yang tidak terkendali. Meski demikian, intensitas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap rasio utang publik masih memiliki perdebatan, Devia (2017) memaparkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap utang di Indonesia. Sementara itu, Amaliah (2018) memaparkan bahwa Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap utang.

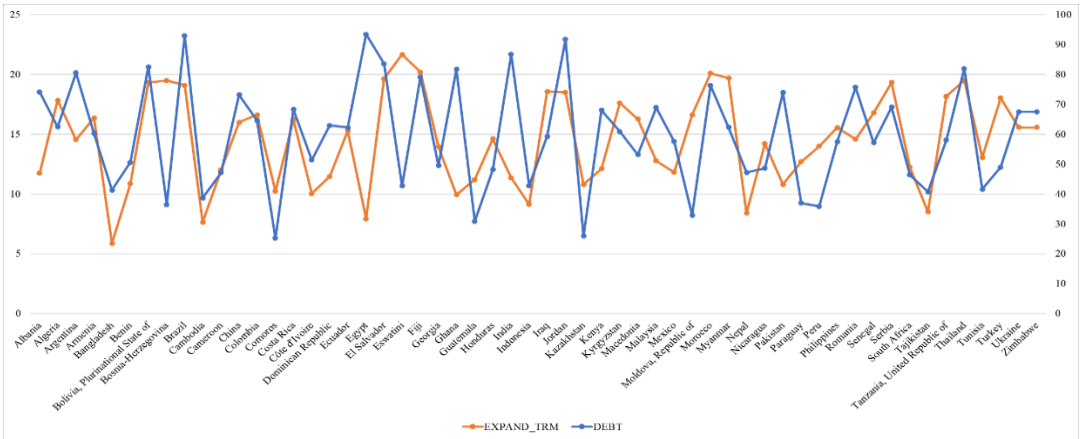

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund, 2022

Gambar 4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021

Berdasarkan gambar 4, pergerakan pengeluaran pemerintah terhadap rasio utang publik antar negara berpendapatan menengah belum dapat disimpulkan secara

pasti. Bagi beberapa negara seperti Mesir dan Fiji memiliki kontradiksi antara pengeluaran pemerintah terhadap rasio utang publik. Artinya, pengeluaran pemerintah bertolak belakang resiko gagal bayar, dimana pengeluaran pemerintahnya rendah akan tetapi memiliki resiko gagal bayar yang tinggi. Gambaran ini secara konstan sejalan dengan studi Keynesian dimana pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat menyebabkan output yang lebih tinggi, dengan peningkatan ouotput maka dapat menurunkan resiko gagal bayar utang. Disisi lain, hal tersebut juga dapat memberikan makna dimana tingginya resiko gagal bayar utang tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Sementara itu, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, Cambodia, Indonesia, Morocco, dan Thailand tingginya rasio utang publik pada tahun 2021 sejelan dengan tingginya pengeluaran pemerintah. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat memberikan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah yang dilakukan belum dapat memberikan dampak positif dalam PDB. Jika situasi tersebut terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan bahwa pengeluaran pemerintah akan mengalami pembengkakan dan cenderung menciptakan utang yang lebih besar, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan penganggaran yang dilakukan pemerintah.

Pembengkakan pengeluaran pemerintah yang nantinya berpengaruh terhadap resiko gagal bayar yang tinggi dapat disebabkan oleh prilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau yang dikenal sebegai *rent seeking behavior*. Mangkoesoebroto (1999) dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Publik menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat prilaku para birokrat merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya kegagalan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai presepsi dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan.

Friedman et al. (2000) menemukan bahwa korupsi dikaitkan dengan peningkatan aktivitas tidak resmi yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan pajak. Penurunan pendapatan pajak melemahkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang publik, hal tersebut mendorong pemerintah untuk

meningkatkan utang publik dalam membiayai penyediaan barang publik. Tingginya tingkat korupsi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan kontrol yang ketat menciptakan peluang alokasi utang publik digunakan kembali untuk pembiayaan suap sehingga efisiensi dari pembangunan dan penyediaan barang publik akan mengalami stagnansi bahkan penurunan, hal ini menyebabkan lingkaran setan antara korupsi dan utang. Montes & Paschoal (2016) memaparkan korupsi menyebabkan kebocoran sumber dana yang merusak efektivitas pemerintah dan menciptakan pemborosan yang dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pengeluaran lebih tinggi. Pengeluaran tersebut yang menyebabkan peningkatan pada utang publik. Sejalan dengan itu, Cooray et al. (2017) dan Benfratello et al. (2018) turut menjelaskan bahwa korupsi berkontribusi untuk meningkatkan utang negara. penurunan tingkat korupsi akan meminimalisir dampak dampak buruk korupsi terhadap utang pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

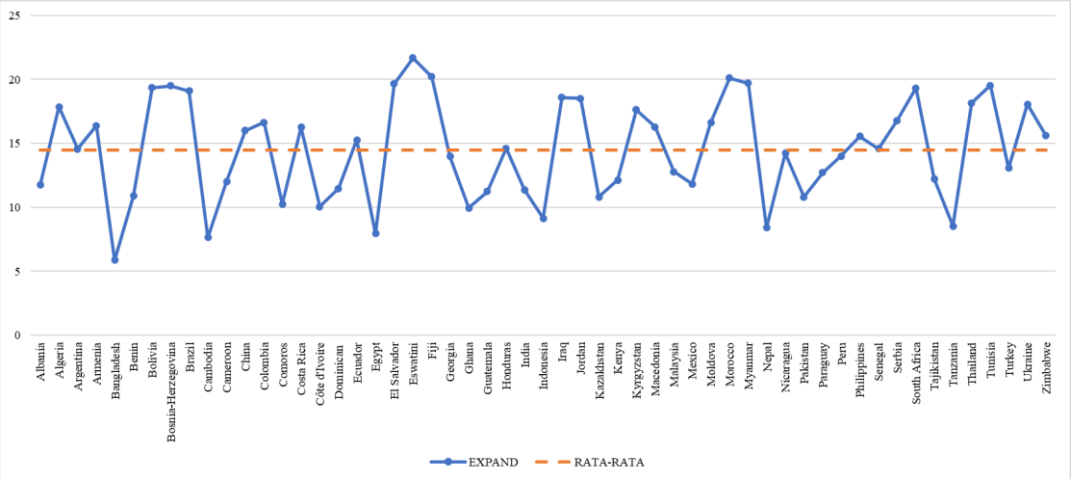

Sumber : Index Perception Corruption, Transparency International, 2022

Gambar 5. Indeks Presepsi Korupsi 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021

Dalam presepsi korupsi, *Transparency International* memaparkan bahwa nilai indeks presepi korupsi yang lebih tinggi (mendekati 100) mengindikasikan bahwa suatu negara memiliki tingkat kasus korupsi yang rendah. Nilai indeks presepsi korupsi dibawah 50 menunjukkan masalah korupsi yang serius dalam suatu negara. Ironisnya, dari total 55 sampel negara berpendapatan menengah, hanya tiga negara yang memiliki nilai indeks presepsi korupsi lebih dari 50. Hal tersebut menggambarkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu permasalahan serius bagi

negara berpendapatan menengah. Tingginya tingkat korupsi dapat berdampak pada meningkatkan volume investasi publik (dengan mengorbankan investasi swasta), karena ada banyak pilihan yang memungkinkan manipulasi pengeluaran publik dan dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi untuk mendapatkan suap (yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih umum atau anggaran besar menawarkan lebih banyak peluang untuk korupsi). Korupsi mengalihkan komposisi pengeluaran publik dari pengeluaran yang diperlukan untuk fungsi dasar dan pemeliharaan ke pengeluaran untuk peralatan baru.

Korupsi sering mengurangi efektivitas berbagai program bantuan keuangan (baik negara maupun internasional), karena uang "hilang di suatu tempat di sepanjang jalan" dan tidak mencapai mereka yang membutuhkannya atau untuk siapa itu dimaksudkan, karena manfaat finansial, yang berasal dari korupsi, tidak kena pajak karena mereka disembunyikan. Negara dengan demikian juga kehilangan sebagian pendapatan dari pajak karena korupsi, sementara pengeluaran publik, yang dihasilkan dari korupsi (atau kepentingan pribadi yang sempit) menyebabkan efek negatif pada anggaran dan pembengkakan pinjaman yang nantinya berujung pada peningkatan resiko gagal bayar.

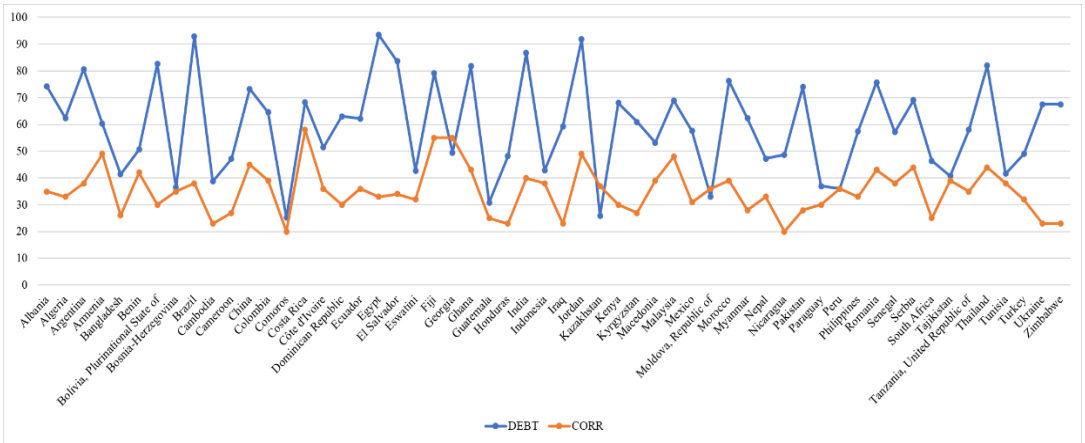

Sumber : *World Economic Outlook, International Monetary Fund*, dan *Index Preception Corruption, Transparency International*, 2022

Gambar 6. Hubungan Korupsi dan Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021

Pada grafik tersebut digambarkan bahwa tingginya tingkat rasio utang publik tidak sepenuhnya linier dengan rendahnya pengendalian korupsi suatu negara. Sekilas,

tinggi rendahnya skor indeks presepsi korupsi suatu negara cenderung sejalan dengan tinggi rendahnya rasio utang publik pada tahun 2021. Disisi lain, semakin tingginya rasio utang publik dapat disebabkan oleh pengendalian korupsi yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau dengan kata lain kebijakan yang pemerintah laksanakan belum sepenuhnya memperhatikan aspek korupsi sehingga manfaat yang didapatkan masyarakat masih cenderung rendah sedangkan utang publik yang dilakukan oleh pemerintah semakin melebar. Oleh karena itu belum dapat dipastikan terkait korelasi antara rasio utang publik dengan korupsi. Terdapat beberapa studi mengenai hubungan antara korupsi (*control of corruption*) dan rasio utang publik, diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Gabriel Caldas Montes et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa negara-negara dengan skor yang lebih tinggi dalam hal pengendalian korupsi menyebabkan utang publik yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengendalian korupsi merupakan aspek penting untuk meningkatkan kinerja fiskal. Temuan ini konsisten dengan bukti yang diberikan oleh Cooray et al. (2017). Sebaliknya, Mehmood et al. (2021) menemukan bahwa *Control of corruption* (pengendalian korupsi) berpengaruh positif terhadap utang publik, atau dengan kata lain peningkatan tingkat pengendalian korupsi (tingkat korupsi rendah) akan meningkatkan utang publik.

Dalam menghadapi permasalahan serius terkait korupsi di negara-negara berpendapatan menengah, penegakkan transparansi yang efisien merupakan salah satu upaya penting harus dilakukan pemerintah dan lembaga terkait. Dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (2022), memaparkan bahwa menurut *Asia Development Bank* (ADB) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), transparansi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan untuk mencegah, mencegah, dan mendeteksi korupsi secara efektif. Misalnya, transparansi memfasilitasi keterlibatan publik dengan meningkatkan peluang bagi warga negara untuk mempengaruhi pengeluaran, kebijakan, dan pengambilan keputusan pemerintah. Promosi transparansi sebagai salah satu alat kebijakan terpenting melawan korupsi digaungkan dalam penegasan klasik Jeremy Bentham tentang kekuatan mata publik:

"*The greater the number of temptations to which the exercise of political power is exposed, the more necessary is it to give those who possess it, the most powerful reasons for resisting them. But there is no reason more constant and more universal than the superintendence of the public*" (Bentham, 1816/1999, p. 29).

Disisi lain, International Monetary Fund (2001) memaparkan bahwa dalam krisis Meksiko 1994 - 1995, pasar pertama kali menjadi tidak pasti karena belum terdapatnya titik terang terkait perkembangan-perkembangan penting dalam pembangunan ekonomi. Data ekonomi yang tidak memadai, kelemahan tersembunyi dalam sistem keuangan, dan kurangnya kejelasan tentang kebijakan pemerintah dan perumusan kebijakan berkontribusi pada hilangnya kepercayaan yang pada akhirnya mengancam akan merusak stabilitas global. Selain itu, Global Financial Crisis (GFC) tahun 2007 – 2008, krisis keungan Uni-Eropa tahun 2014 menunjukkan kelemahan yang serius pada pelaporan fiskal. Ketidakpastian mengenai situasi nyata dari akun publik, menimbulkan keraguan dalam kaitannya dengan efektivitas kebijakan pemerintah, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait efektivitas peran pemerintah.

Pada dasarnya, transparansi fiskal telah menjadi salah satu praktik yang diperhatikan bagi beberapa negara tepat setelah *Organisation for Economic Co-operation dan Development* (OECD) merilis sebuah dokumen berjudul "*OECD Best Practices for Budget Transparency*" sebagai refrensi dan pertimbangan dari peningkatan transparansi fiskal. Seiring dengan perkembangan penelitian terkait transparansi fiskal dan mulai terciptanya kesadaran akan pentingnya transparansi fiskal, berbagai upaya dikerahkan masyarakat dan pemerintahan internasional untuk mencegah krisis di masa depan salah satunya melalui pengembangan komitmen untuk meningkatkan transparansi di negara-negara. Keterbukaan dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan dalam menyebarkan data perkembangan ekonomi dan keuangan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan bersamaan dengan faktor-faktor pembangunan ekonomi yang terkait dengan penguatan fundamental ekonomi lainnya.

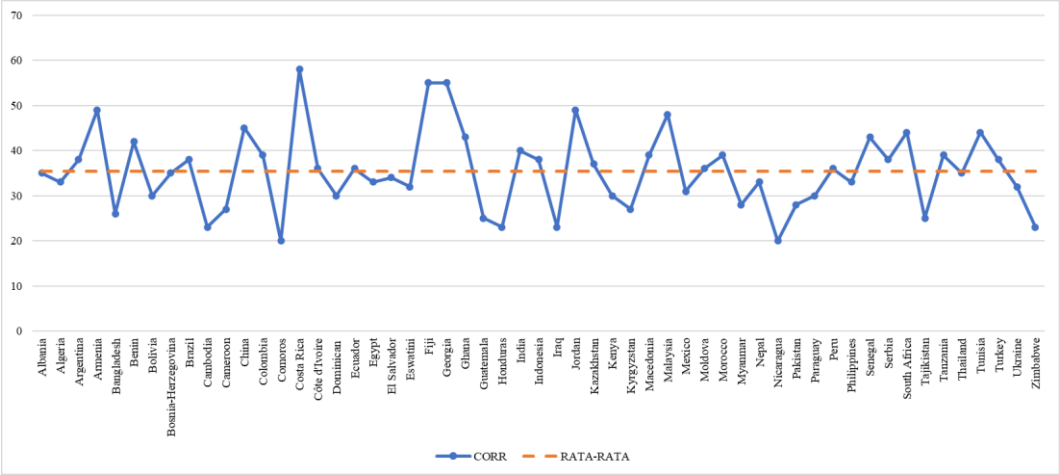

Sumber : Open Budget Index, International Budget Partnership, 2022
Gambar 7. Transparansi Fiskal 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021

Faktanya, pentingnya transparansi fiskal tidak diindahkan dalam penerapannya di negara berpendapatan menengah. Berdasarkan kalsifikasi yang dilakukan oleh *Transparency International*, ketersediaan dokumen dalam menunjang transparansi fiskal dikategorikan cukup apabila nilai indeks paling sedikit mencapai pada angka 60. Sedangkan di negara berpendapatan menengah, Georgia, Serbia, Mexico, Brazil, Dominican Republic, Indonesia, Philippines, Benin, Moldova, Turkey, Guatemala, Costa Rica, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Honduras, Jordan, dan Peru merupakan negara yang memiliki indeks transparansi fiskal lebih besar daripada standar yang ditentukan, atau dengan kata lain hanya 34 persen dari total pengamatan yang memiliki indeks transparansi fiskal yang mencukupi. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan transparansi fiskal di negara-negara berpendapatan menengah masih cenderung minim.

Disisi lain, transparansi fiskal di beberapa negara berpendapatan menengah masih acapkali dipandang rendah oleh masyarakat dan menjadi salah satu penyebab pergesekan yang terjadi diantara masyarakat dengan pemerintah. Tidak sedikit, konflik yang terjadi antara pemerintahan dan masyarakat berlandaskan dengan tidak bersinerginya anggaran yang tercatat dalam rancangan alokasi dana dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nyatanya, tingginya nilai index transparansi fiskal tidak dapat membendung pertanyaan dan keraguan-keraguan yang timbul diantara masyarakat. Oleh karena itu, pengaruh tinggi rendahnya

transparansi fiskal terhadap perekonomian merupakan salah satu pertanyaan yang timbul dari fenomena tersebut.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, studi yang dilakukan oleh Arbatli & Escolano (2015) yang membahas saluran langsung dan tidak langsung di mana transparansi fiskal mempengaruhi credit ratings; Gabriel Caldas Montes et al. (2019) turut mempertimbangkan dua saluran (langsung dan tidak langsung) pengaruh transparansi fiskal terhadap efektivitas pemerintah dan efisiensi pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian tersebut, dipaparkan bahwa transparansi fiskal secara tidak langsung berpengaruh melalui pada utang publik. G. C. Montes & Paschoal (2016) memberikan bukti empiris untuk penentu efektivitas pemerintah untuk satu set 130 negara (30 maju dan 100 berkembang). Pada penelitian tersebut, ditemukan bukti bahwa rata-rata negara dengan utang yang tinggi memiliki efektivitas pemerintah yang rendah.

Di sisi lain, Arbatli & Escolano (2015) menemukan bukti bahwa tingkat transparansi fiskal yang lebih tinggi dikaitkan dengan rasio utang publik yang lebih rendah. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membangun hubungan antara transparansi fiskal dan efektivitas pemerintah dengan mempertimbangkan utang publik sebagai mekanisme transmisi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Glennerster & Shin (2008) mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengadopsi reformasi yang meningkatkan transparansi fiskal bermanfaat bagi negara-negara dengan pasar utang yang lebih kecil dan kurang likuid. G. C. Montes & Paschoal (2016) turut menemukan bukti hubungan positif dan nonlinier antara transparansi fiskal dan utang publik.

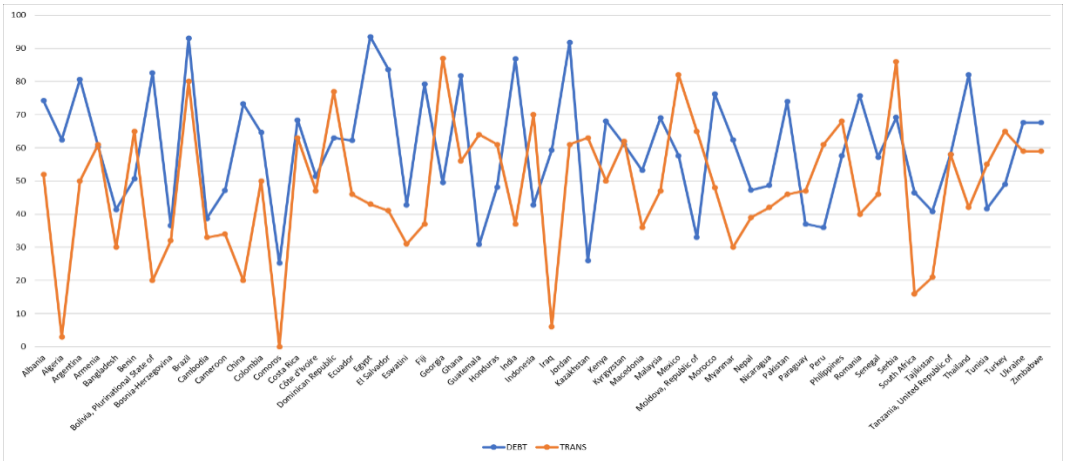

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund dan Open Budget Index, International Budget Partnership, 2022

Gambar 8. Hubungan Transparansi Fiskal dan Rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021

Gambar 8 menunjukkan bahwa pergerakan dalam grafik hubungan antara tingkat transparansi fiskal dengan rasio utang publik antar negara berpendapatan menengah tidak sepenuhnya linier dan cenderung bertolak belakang. Artinya terdapat hubungan negatif antara transparansi fiskal dengan rasio utang publik tahun 2021 untuk negara berpendapatan menengah. Sekilas melalui grafik, pergerakan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Alt & Lassen (2006) dan Gabriel Caldas Montes et al. (2019) yang memaparkan bahwa transparansi fiskal sangat terkait dengan tingkat utang yang lebih rendah karena sistem fiskal yang lebih transparan memberi para pembuat kebijakan insentif untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang bertanggung jawab. Akan tetapi, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Peat et al. (2015) yang menemukan bukti bahwa ada hubungan positif dan nonlinier antara transparansi fiskal dan utang publik. Disisi lain, Arbatli & Escolano (2015) menemukan bahwa transparansi fiskal, di negara maju memiliki efek signifikan pada rasio utang publik, tetapi mengenai sampel lengkap dan sampel negara berkembang, mereka menemukan bukti bahwa efek transparansi fiskal pada utang rendah dan tidak menunjukkan signifikansi statistik.

Penerbitan informasi secara proaktif oleh pemerintah dan menyederhanakan prosedur administratif adalah cara tambahan untuk mempromosikan transparansi yang melampaui akses tradisional ke praktik informasi. Inisiatif ini mendorong pemerintah untuk menyediakan data yang terbuka dan dapat diakses publik tentang

proses pemerintah dan politik. Pendekatan-pendekatan ini sering dioperasionalkan melalui sistem *e-budgeting* yang menggunakan Internet untuk menyediakan layanan dan informasi publik dan menyederhanakan dan meningkatkan akses publik ke prosedur administratif. Prinsip bahwa warga negara harus memiliki akses langsung ke informasi seperti anggaran publik dan cara pemerintah membelanjakan uang pembayar pajak, penyediaan layanan publik dan persaingan dan hasil pemilihan, untuk beberapa nama. Ketika informasi tersebut bersifat publik, warga negara, jurnalis, akademisi, dan lembaga pengawas dapat menyaringnya untuk perilaku korup atau mencurigakan. Ini, pada gilirannya, memfasilitasi deteksi penyimpangan dan inefisiensi birokrasi, dan mencegah praktik terlarang yang mungkin terjadi secara rahasia.

Demikian pula dengan undang-undang akses ke informasi, berbagi data secara proaktif oleh lembaga publik memfasilitasi deteksi korupsi. Di Ukraina, misalnya, sistem data online dan terbuka yang disebut *ProZorro* diluncurkan pada tahun 2015 untuk memastikan bahwa dokumen dan informasi yang terkait dengan pengadaan publik akan mudah diakses oleh masyarakat sipil. Faktanya, banyak negara telah menerapkan persyaratan hukum untuk mempublikasikan data terbuka tentang proses tender dalam pengadaan publik. Selain itu, banyak negara memiliki undang-undang yang mengharuskan pejabat publik untuk menyatakan aset dan kepentingan mereka. Sistem deklarasi ini melayani dua peran. Pertama, mereka mempromosikan transparansi dan secara pro-aktif mengidentifikasi konflik kepentingan. Kedua, memfasilitasi deteksi korupsi jika diikuti dengan penyelidikan administratif. Upaya untuk menyediakan platform informasi terbuka sangat penting untuk mencegah peluang bagi korupsi yang berujung kepada pembengkakan pengeluaran dan peningkatan utang yang tidak diiringi dengan produktivitas dalam meningkatkan kemampuan membayar utang (United Nations Office on Drugs and Crime, 2022).

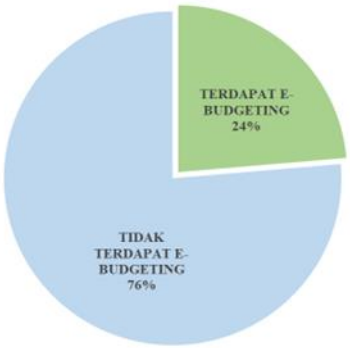

Sumber : Data diolah penulis, 2022

Gambar 9. Persentase Ketersediaan Sistem *E-Budgeting* di 55 Negara Berpendapatan Menengah Tahun 2021

Dalam praktiknya, diketahui bahwa Georgia, India, Morocco, Indonesia, Turkey, Thailand, Bosnia-Herzegovina, Philippines, Ukraine, Mexico, Kenya, dan Pakistan merupakan negara yang memiliki sistem e-budgetig yang dapat diakses secara luas. Atau dengan kata lain, hingga tahun 2021 hanya 29 persen dari total 100 persen negara berpendapatan menengah yang memiliki sistem *e-budgeting*. Disisi lain, fungsi penerapan *e-budgeting* di Indonesia memiliki pro kontra antar lembaga. Brilliyanti (2018) memaparkan bahwa Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menilai bahwa program sistem *e-budgeting* justru "mengebiri" peran DPRD DKI Jakarta dalam melakukan fungsi pengawasan dan hal budgeting. Menurutnya, *e-budgeting* adalah program yang dirancang agar eksekutif berjalan tanpa ada kontrol parlemen. Dengan begitu, pemerintah dibuat untuk tidak lagi perlu mengindahkan usulan legislative dalam pembahasan anggaran. Upaya perlembahan tersebut diiringi dengan "pembuusukan" terhadap citra legislative yaitu terkait tudingan sebagai koruptor. Sementara itu, Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK menyebutkan bahwa salah satu wilayah yang rawan korupsi adalah penganggaran. Degan adanya *e-budgeting* diharapkan menjadi langkah konkrit untuk meminimlisir adanya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), dikarenakan dengan adanya sistem *e-budgeting* akan semakin mudah melakukan pengawasan karena semua anggaran sudah terkoneksi dengan sistem yang dapat diakases kapanpun.

Secara keseluruhan, pro-kontra yang terjadi mendorong adanya ketertarikan lebih terhadap pengaruh eksistensi *e-budgeting* terhadap perekonomian suatu negara

mendorong peneliti untuk meneliti data di salah satu akun publik yang seringkali rentan terhadap korupsi seperti dalam penganggaran. Meskipun transparansi sangat penting untuk mengekspos dan meminimalisir korupsi, transparansi saja tidak cukup untuk mengurangi korupsi secara berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa transparansi mengurangi korupsi, informasi tidak hanya harus menjangkau dan diterima oleh publik, tetapi publik harus bertindak untuk mendapatkan informasi tersebut untuk mempengaruhi perilaku agen yang berpotensi korup. Oleh karena itu, “reformasi yang berfokus pada peningkatan transparansi harus disertai dengan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertindak berdasarkan informasi yang tersedia" (Lindstedt & Naurin, 2010).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021?
3. Bagaimana korupsi terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021?
4. Bagaimana pengaruh transparansi fiskal terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021?
5. Bagaimana pengaruh *e-budgeting* terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021?
6. Bagaimana pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting* terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021 secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.

2. Untuk menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.
3. Untuk menganalisa pengaruh korupsi terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.
4. Untuk menganalisa pengaruh transparansi fiskal terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.
5. Untuk menganalisa pengaruh *e-budgeting* terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.
6. Untuk menganalisa pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting* terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021 secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap penelitin ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi publik mengenai pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting* terhadap rasio utang publik.
2. Manfaat Praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan baik bagi pihak pemerintah, swasta, hingga masyarakat terkait relevansi rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting* terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021 sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Public Finance Theory*

Public Finance adalah studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Ini adalah cabang ekonomi yang menilai pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dari otoritas publik dan penyesuaian satu atau yang lain untuk mencapai efek yang diinginkan dan menghindari yang tidak diinginkan. Menurut Musgrave, pemerintah dalam lingkup keuangan publik dikelompokkan yang terdiri dari efek pemerintah pada:

1. Alokasi sumber daya yang tersedia secara efisien;
2. Distribusi pendapatan di antara warga negara; dan
3. Stabilitas ekonomi.

Peran pemerintah yang tepat memberikan titik awal untuk analisis keuangan publik. Pemerintah dapat membayar pengeluaran dengan meminjam (misalnya, dengan obligasi pemerintah), meskipun meminjam adalah metode untuk mendistribusikan beban pajak melalui waktu daripada penggantian pajak. Defisit adalah perbedaan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan. Akumulasi defisit dari waktu ke waktu adalah total utang publik. Pembiayaan defisit memungkinkan pemerintah untuk memuluskan beban pajak dari waktu ke waktu dan memberi pemerintah alat kebijakan fiskal yang penting. Defisit juga dapat mempersempit pilihan pemerintah penerus. Ada juga perbedaan antara keuangan publik dan swasta, dalam keuangan publik sumber pendapatan tidak langsung, misalnya, berbagai pajak (pajak tertentu, pajak pertambahan nilai), tetapi dalam keuangan swasta sumber pendapatan langsung.

Jonathan Gruber telah mengemukakan kerangka kerja untuk menilai bidang keuangan publik yang luas. Gruber menyarankan keuangan publik harus dipikirkan dalam hal empat pertanyaan sentral:

1. Kapan pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian? Di mana ada dua motivasi utama untuk intervensi pemerintah, Kegagalan pasar dan redistribusi pendapatan dan kekayaan.
2. Bagaimana mungkin pemerintah turun tangan? Setelah keputusan dibuat untuk campur tangan, pemerintah harus memilih alat atau pilihan kebijakan khusus untuk melakukan intervensi (misalnya penyediaan publik, perpajakan, atau subsidi).
3. Apa efek dari intervensi tersebut terhadap hasil ekonomi? Sebuah pertanyaan untuk menilai efek langsung dan tidak langsung empiris dari intervensi pemerintah tertentu.
4. Dan akhirnya, mengapa pemerintah memilih untuk campur tangan dengan cara yang mereka lakukan? Pertanyaan ini sangat berkaitan dengan studi ekonomi politik, berteori bagaimana pemerintah membuat kebijakan publik.

2.1.2 *Government Trust*

Kualitas kelembagaan merupakan faktor kontekstual yang penting. Meningkatnya utang pemerintah, ditambah dengan kualitas kelembagaan yang baik, dapat menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Meskipun demikian, aspek kelembagaan yang digunakan dalam literatur belum mempertimbangkan kepercayaan publik. OECD (2017) melaporkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat menghambat pendapatan dan membuat pemerintah lebih sulit dalam implementasi kebijakan (Hesda & Yuliani, 2021). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa agen (manajemen) dan pemilik (prinsipal) akan menghadapi konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini juga terjadi di sektor publik antara birokrat dan warga negara (termasuk sektor swasta). Para birokrat memiliki kepentingannya sendiri. Menurut motif ini, mereka akan mengabaikan kepentingan warga; oleh karena itu, mereka cenderung merusak dan salah menghabiskan anggaran. Kekuatan pemerintahan akan meningkatkan pengeluaran dan pembiayaan pemerintah dalam hal investasi produktif dan layanan publik.

Birokrat yang bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan publik akan mampu menciptakan stabilitas jangka panjang (Rauch, 1995).

Tata kelola pemerintahan yang baik juga merupakan cara pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik merupakan konsekuensi atau hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, itu tidak selalu terpenuhi karena kepercayaan itu bercampur dalam keyakinan dan pengertian logis (OECD, 2017). Kepercayaan publik juga mewakili efek perilaku dan psikologis yang menggambarkan bagaimana warga negara dan sektor bisnis berperilaku dan bereaksi karena kebijakan utang pemerintah (Döring & Oehmke, 2019). Lebih lanjut, Hesda & Yuliani (2021) memaparkan bahwa kepercayaan publik cenderung menjadi mediator daripada faktor kontekstual, meningkatnya utang sejalan dengan menurunnya kepercayaan publik, dan menurunnya kepercayaan publik memiliki keterkaitan erat dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, tata kelola dan kepercayaan publik merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan utang pemerintah atau pembuatan kebijakan fiskal. Ambang batas utang sebagai aturan anggaran diperlukan tetapi tidak cukup untuk memvalidasi keamanan kenaikan utang. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan tata kelola publik dan efek utang tambahan terhadap kepercayaan publik adalah aspek penting lainnya yang perlu dicermati secara serius, atau ketika penambahan utang menjadi tidak dapat dihindari (seperti dalam situasi pandemi), pemerintah harus memperkuat kemampuan tata kelola untuk memastikan produktivitas utang dan memitigasi penurunan kepercayaan publik. Kebijakan utang seharusnya tidak hanya didasarkan pada aturan anggaran tetapi juga kapasitas tata kelola dan potensi implikasinya terhadap jatuhnya kepercayaan publik (Hesda & Yuliani, 2021).

2.1.3 Utang Publik

2.1.3.1 Pengertian Utang Publik

Utang publik adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi

mendatang. Utang publik dapat meningkat baik secara eksternal maupun internal, di mana eksternal adalah utang kepada pemberi pinjaman di luar negeri dan utang internal merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi pinjaman domestik.

Utang publik sering dinyatakan sebagai rasio utang publik. Rasio utang publik adalah metrik yang membandingkan utang publik suatu negara dengan PDB. Dengan membandingkan apa yang dimiliki suatu negara dengan apa yang dihasilkannya, rasio utang publik menunjukkan bahwa kemampuan negara tertentu untuk membayar kembali utangnya. Sering dinyatakan sebagai persentase, rasio ini juga dapat diartikan sebagai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk membayar kembali utang jika PDB didedikasikan sepenuhnya untuk pembayaran utang. IMF mengelompokkan utang publik menjadi empat indikator, diantaranya adalah :

1. *Central Government Debt*
2. *General Government Debt*
3. *Nonfinancial Public Sector Debt*
4. *Public Sector Debt*

Ketika suatu negara gagal membayar utangnya, sering memicu kepanikan keuangan di pasar domestik dan internasional. Sebagai aturan, semakin tinggi rasio utang publik suatu negara naik, semakin tinggi risiko gagal bayarnya. *World Bank* (2013) menemukan bahwa negara-negara yang rasio utang publik melebihi 77% untuk waktu yang lama mengalami perlambatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan persentase utang di atas 77% dapat memperlambat 0.017% pertumbuhan ekonomi. Fenomena tersebut lebih terasa di pasar negara berkembang, di mana setiap peningkatan persentase utang lebih dari 64% per tahun memperlambat pertumbuhan sebesar 0,02%. Ananda (2022) memaparkan secara khusus, pembiayaan yang bersumber dari utang di masa krisis kerap menjadi polemik dan cenderung dianggap buruk. Padahal, utang merupakan alat ungkit (*leverage*) yang apabila dikelola dengan baik, dapat membuahkan manfaat. Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menambal defisit akibat pandemi Covid 19, utang menjadi salah satu opsi untuk meredam dampak krisis dan membantu pemerintah untuk keluar dari resesi.

2.1.3.2 Teori Utang Ponzi

Terdapat beberapa teori mengenai siklus krisis yang terjadi di dunia, khususnya krisis ekonomi dan finansial. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa krisis yang telah terjadi tidak mungkin terulang dengan siklus yang teratur, sehingga polanya tidak dapat diperkirakan. Namun terdapat beberapa krisis yang terjadi dengan pola tertentu meskipun akar krisis dan dampaknya akan berbeda. Beberapa ekonom telah mencoba memetakan pola terjadinya krisis agar dapat menjelaskan secara empiris terjadinya krisis keuangan. *Teori The Ingredients of a Financial Market Crisis* telah dikembangkan oleh Hyman Misnky dengan tujuan untuk dapat mengindentifikasi krisis yang terjadi (Tim Kajian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu RI, 2012).

Secara lebih lanjut, dalam publikasi Tim Kajian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu RI (2012) memaparkan bahwa menurut Minsky terdapat empat pola dasar dari terjadinya suatu krisis keuangan, yakni:

1. Goncangan awal (*initial shock*), sebagian besar krisis terjadi dengan gejala dan goncangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Beberapa jenis goncangan tersebut dapat berupa: Inovasi teknologi, seperti munculnya produk-produk dan jasa baru, teknologi produksi dan bahan baku yang baru ditemukan;
    a. Inovasi pasar keuangan, yakni jenis aset, instrumen derivatif atau strategi investasi yang baru;
    b. Deregulasi pasar keuangan, berkurangnya hambatan di pasar keuangan seperti harga, modal, dan lingkup pasar;
    c. Ajang politik, terjadinya perubahan pemerintahan, berakhirnya perang, atau terjadinya kesepakatan internasional.
2. Mekanisme tanggapan positif (*positive feedback mechanism*), pasar keuangan memiliki kerentanan terhadap sentimen atau ekspektasi dari para pelaku pasar. Namun ekspektasi positif seringkali muncul dengan naif dan tidak mewaspadai kemungkinan terjadinya goncangan yang berdampak negatif.
3. Sumber pembiayaan (*funding source*), dalam rangka mempertahankan sentimen positif, harus terdapat sarana untuk mendorong perekonomian dan kondisi pasar uang, yakni suatu kebijakan seperti halnya restrukturisasi

portofolio, peningkatan jumlah uang beredar (kebijakan moneter longgar), peningkatan investasi asing, atau akuisisi kekayaan asing.

4. Goncangan negatif (*negative shock*), banyak kondisi positif yang tidak diwaspadai yang pada jangka panjang justru menimbulkan dampak yang negatif, misalnya kenaikan harga aset yang pada akhirnya menimbulkan gelembung harga aset yang pecah tanpa adanya perkiraan.

Hyman P. Minsky secara sederhana menjelaskan bahwa semakin besar pelaku mengakumulasi utang, semakin besar risiko gagal bayar dan mekanisme ini terjadi secara alami (Prasetyantoko, 2010). Minsky mengidentifikasi ada tiga tipe pengutang, yaitu pengutang yang berhati-hati (hedge), pengutang yang spekulatif (speculative), dan pengutang yang tak lagi bisa membayar (ponzi). Pengutang hedge, prinsipnya adalah pengutang yang mampu melakukan pembayaran utang dengan baik. Spekulatif adalah pengutang yang mampu membayar cicilan utang dengan cara menjual asetnya. Sementara ponzi, adalah pengutang yang tak lagi mampu membayar cicilan dan bunga dari aliran kas yang dihasilkan dari investasinya. Begitu terjadi depresiasi terhadap asetnya, mereka tak lagi mampu membayar.

2.1.3.3 *Overhang Debt*

Debt overhang adalah kondisi dimana lembaga (pemerintah, swasta, dan masyarakat) memiliki utang yang begitu besar sehingga tidak dapat mengambil utang tambahan untuk membiayai proyek-proyek masa depan. Meskipun ketika pinjaman baru yang dilakukan sebenarnya merupakan peluang investasi yang nantinya dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian, akan tetapi beban utang yang begitu besar mendorong hampir seluruh pendapatan cenderung dialokasikan melunasi hutang yang ada daripada mendanai proyek investasi baru, sehingga menciptakan resiko gagal bayar lebih tinggi. Tunggakan utang dapat menyebabkan kurangnya investasi, yang menghambat pertumbuhan, membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Tumpang tindih utang dapat menyebabkan pertumbuhan yang stagnan dan penurunan standar hidup dari pengurangan dana menjadi pengeluaran di bidang-bidang penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Kagan, 2021).

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

2.1.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran atau belanja pemerintah mencakup seluruh konsumsi pemerintah, investasi, dan pembayaran transfer. Dalam akuntansi pendapatan nasional, akuisisi oleh pemerintah barang dan jasa untuk penggunaan saat ini, untuk secara langsung memenuhi kebutuhan individu atau kolektif masyarakat, digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Akuisisi barang dan jasa oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk menciptakan manfaat masa depan, seperti investasi infrastruktur atau pengeluaran penelitian, digolongkan sebagai investasi pemerintah (pembentukan modal kotor pemerintah). Kedua jenis pengeluaran pemerintah ini, untuk konsumsi akhir dan pembentukan modal kotor, bersama-sama merupakan salah satu komponen utama dari produk domestik bruto.

Perubahan dalam pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama dari kebijakan fiskal yang umumnya digunakan untuk menstabilkan siklus bisnis makroekonomi. Kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai penggunaan belanja pemerintah dan/atau perpajakan sebagai mekanisme untuk mempengaruhi suatu perekonomian. Ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu :

1. Kebijakan fiskal ekspansif adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan perpajakan, sedangkan kebijakan fiskal kontraksi adalah penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak. Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan oleh pemerintah untuk merangsang perekonomian selama resesi. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah secara langsung meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang dapat membantu meningkatkan output dan lapangan kerja.
2. Di sisi lain, kebijakan fiskal kontraksi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendinginkan ekonomi selama ledakan ekonomi. Penurunan belanja pemerintah dapat membantu menjaga inflasi tetap terkendali.

Selama penurunan ekonomi, dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah dapat diubah baik melalui stabilisasi otomatis atau stabilisasi diskresi. Stabilisasi otomatis adalah ketika kebijakan yang ada secara otomatis mengubah pengeluaran pemerintah atau pajak sebagai tanggapan terhadap perubahan ekonomi, tanpa pengesahan undang-undang tambahan. Stabilisasi diskresi adalah ketika

pemerintah mengambil tindakan untuk mengubah pengeluaran pemerintah atau pajak sebagai tanggapan langsung terhadap perubahan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah sebagai akibat dari resesi. Dengan stabilisasi diskresi, pemerintah harus mengesahkan undang-undang baru untuk membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah

2.1.4.2 Pandangan Keynesian

Dalam pandangan Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah dan pajak yang lebih rendah dianggap dapat merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, ekonomi Keynesian digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui stabilisasi aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonom Keynesian membenarkan intervensi semacam itu karena kebijakannya yang bertujuan untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Keynes mengusulkan agar pemerintah menghabiskan lebih banyak uang melalui konsumsi dan memotong pajak untuk mengubah defisit anggaran, yang akan meningkatkan permintaan konsumen dalam perekonomian. Sehingga pada gilirannya, akan mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan pengurangan pengangguran.

2.1.4.3 Pandangan Klasik

Berbanding terbalik dengan pandangan Keynesian, ekonomi klasik memaparkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat memperburuk kontraksi ekonomi dengan mengalihkan sumber daya dari sektor swasta, yang mereka anggap produktif, ke sektor publik, yang mereka anggap tidak produktif. David Ricardo merupakan salah satu tokoh dalam ekonomi kalsik. Teori David Ricardo tentang pinjaman publik didasarkan pada penekanan fakta bahwa dibandingkan dengan metode yang digunakan dalam membiayai pengeluaran, beban utama bagi masyarakat adalah berasal dari sifat boros pengeluaran publik itu sendiri (Roberts, 1942). (Pribadi, 2016) memaparkan bahwa konsep dasar pandangan Ricardian ini berasal dari asumsi bahwa pemotongan pajak dan penarikan utang pemerintah pada saat ini, akan meningkatkan pengenaan pajak di masa datang untuk membayar pokok dan

bunga utang. Pemotongan pajak yang didanai oleh utang pemerintah tidak akan mengurangi beban pajak, karena hanya merupakan penjadwalan ulang pajak. Masyarakat yang melihat ke masa depan memahami hal tersebut, sehingga pemotongan pajak saat ini tidak mendorong peningkatan konsumsi dan pengeluaran masyarakat. Masyarakat yang melihat ke masa depan akan meningkatkan tabungan mereka untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa datang. Hal ini meningkatkan tabungan pemerintah sehingga mengeliminasi kenaikan tingkat bunga yang diakibatkan karena kebijakan defisit pemerintah.

2.1.4.4 *Paradox of Debt*

Dari perspektif makro, keputusan tertentu yang tampaknya masuk akal bagi individu mungkin memiliki hasil yang berlawanan ketika semua individu bertindak dengan cara yang sama. Salah satunya adalah *paradox of debt*: dalam kebijakan ekonomi, setiap upaya untuk mengurangi rasio utang terhadap produk domestik bruto (utang/PDB) dengan membekukan atau memotong pengeluaran publik sebenarnya dapat meningkatkan bobot utang (Uxó & Álvarez, 2019). Akan tetapi, Brandy Wine Global (2016) memaparkan terdapat dua alasan utama yang mempengaruhi peminjam melakukan pinjaman, pertama, mengubah pinjaman menjadi investasi; dan yang kedua adalah meminjam pendapatan masa depan yang diharapkan untuk membiayai konsumsi saat ini. Saat menggunakan utang untuk menyalurkan tabungan ke dalam investasi, aset yang sesuai terbentuk. Namun, ketika menggunakan utang untuk meminjam pendapatan masa depan untuk meningkatkan konsumsi saat ini, tidak ada pembentukan aset yang sesuai. Hasil bersihnya adalah penurunan tingkat tabungan nasional.

Sementara itu dari sisi pemerintah, perubahan rasio utang/PDB adalah hasil dari dua efek yang berbeda. Pertama, terkait langsung dengan kebijakan fiskal pemerintah: dengan defisit anggaran primer, pemerintah harus menerbitkan obligasi baru (setidaknya jika bank sentral tidak dapat meminjamkan kepada pemerintah secara langsung), sementara utang berkurang dengan surplus primer. Kedua adalah 'efek bola salju': di satu sisi, pemerintah harus membayar bunga atas utang saat ini, yang menyiratkan pengeluaran yang lebih tinggi dan utang segar; di sisi lain, jika ekonomi tumbuh, pembayaran ini akan mewakili persentase

penurunan PDB. Efek bola salju dengan demikian cenderung mengurangi bobot utang publik ketika tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari tingkat bunga, dan sebaliknya (Uxó & Álvarez, 2019). Jika tujuan pemerintah adalah penurunan rasio utang/PDB, membatasi pengeluaran publik untuk mendapatkan surplus primer 'tampaknya' merupakan rekomendasi yang masuk akal. Tetapi ini hanya berlaku jika keputusan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan atau jika efek ini (pengganda fiskal) kecil. Jika ini tidak terjadi, dan kebijakan fiskal memang berdampak pada kegiatan ekonomi, kerugian yang berasal dari kebijakan fiskal yang lebih ketat (berkurangnya pertumbuhan ekonomi dan efek bola salju negatif) dapat mengimbangi apa yang diperoleh pemerintah dari surplus primer (lebih sedikit utang baru yang diterbitkan).

2.1.5 *Good Governance Principle*

United Nations (UN) mengemukakan bahwa *governance* mengacu pada kegiatan semua otoritas politik dan administrasi untuk mengatur negara mereka. Sementara itu, *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan *governance* adalah konsep di mana suatu negara dikelola, termasuk aspek ekonomi, kebijakan, dan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut masa secara umum, *governance* dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses penentuan kebijakan mana yang akan dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Tata kelola mencakup bagaimana pemerintah dipilih, dipantau dan diganti; kapasitas pemerintah untuk secara efektif mengembangkan dan menerapkan kebijakan, dan menghormati masyarakat dan negara sehubungan dengan lembaga-lembaga yang mengatur interaksi antara ekonomi dan sosial antara warga negara dan negara.

Pada 1990-an, *World Bank* menjadi lembaga internasional pertama yang mengadopsi konsep tata kelola yang baik ke dalam pengaturan pinjaman untuk negara-negara berkembang dan memperkenalkan gagasan tersebut kepada masyarakat umum. Dalam laporan tahun 1992 berjudul "*Governance and Development*", gagasan *good governance* ditulis sebagai upaya dimana kekuasaan digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. *Good Governance* bertujuan untuk meminimalkan korupsi, mempertimbangkan pendapat minoritas, mendengarkan suara rakyat tertindas dalam proses pengambilan keputusan, dan menanggapi secara aktif

kebutuhan masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang. Mengutip dari *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), konsep good governance memiliki delapan prinsip, diantaranya adalah:

a. *Participation* (Partisipasi)

   Partisipasi dalam konsep *good governance* adalah kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapat mereka melalui lembaga atau representasi. Selain itu, setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk kebebasan berserikat dan berekspresi.

b. *Rule of Law* (Aturan hukum)

   Dalam menerapkan *good governance*, kerangka hukum di negara ini harus ditegakkan secara imparsial, terutama mengenai hukum hak asasi manusia.

c. *Transparency* (Transparansi)

   Transparansi berarti bahwa setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Selain itu, harus ada jaminan bahwa setiap informasi yang terkait dengan kebijakan tersebut dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

d. *Responsiveness* (Responsif)

   Good governance membutuhkan lembaga dan proses untuk mencoba melayani semua pemangku kepentingan dalam waktu yang efisien.

e. *Consensus Oriented* (Berorientasi konsensus)

   Prinsip kelima ini terkait dengan proses pengambilan keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan tidak dapat mengakomodasi keinginan setiap orang, maka minimal, keputusan harus menjadi keputusan yang dapat diterima oleh semua orang dan tidak merugikan siapa pun.

f. *Equity and Inclusiveness* (Ekuitas dan Inklusivitas)

   Good governance menjamin keadilan bagi masyarakat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

g. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan efisiensi)

Setiap proses pengambilan keputusan dan lembaganya harus mampu menghasilkan keputusan yang memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Sumber daya masyarakat juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.

h. *Accountability* (Akuntabilitas)

Setiap lembaga yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tanggung jawab penuh kepada publik demi meningkatkan kualitas masyarakat.

World Government Index (WGI) adalah alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur *governance*. WGI terdiri dari enam dimensi tata kelola yang telah dipaparkan dalam database WGI oleh *World Bank*. Berdasarkan definisi *governance* yang digambarkan dalam WGI, banyak ekonom setuju bahwa *good gavernance* memainkan peran penting dalam analisis kinerja di seluruh negara.

2.1.6 Korupsi

2.1.6.1 Pengertian Korupsi

Menurut *World Bank* (2020), korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang mencakup berbagai perilaku, mulai dari penyuapan hingga pencurian dana publik. Korupsi biasa terjadi di negara-negara dengan institusi yang lemah dan sering kali dipengaruhi oleh kerapuhan dan konflik. Indeks persepsi korupsi atau the *corruption perceptions index* (CPI) merupakan indikator yang banyak digunakan di seluruh dunia untuk mengukur tingkat korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) didirikan pada tahun 1995 sebagai indikator gabungan yang digunakan untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik di berbagai negara di dunia. Indeks ini merupakan indeks kombosit dari kombinasi 13 survei dan penilaian *korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkemuka di dunia, yaitu African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment, Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators, Bertelsmann Stiftung Transfomation Index, Economist Intelligence Unit Country Risk Service, Freedom House Nations in Transit, Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook EOS, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, The PRS Group International Country Risk Guide, World Bank Country Policy and Institutional Assessment,*

World Economic Forum Executive Opinion Survey, World Justice Project of Law Indes Expert Survey, dan *Varieties of Democracy.*

Indeks persepsi korupsi menggunakan skala 0-100. Jika suatu negara memiliki indeks persepsi korupsi mendekati 0, maka tingkat korupsi pada negara tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, jika indeks persepsi korupsi pada negara tersebut mendekati 100, maka tingkat korupsi akan semakin rendah.

2.1.6.2 *Sand the Wheels Hypothesis*

Sand the Wheels Hypothesis, menunjukkan bahwa korupsi dapat berdampak buruk pada aktivitas sektor keuangan. *Sand the Wheels Hypothesis* berawal dari buruknya fungsi birokrasi, dampak positif korupsi terhadap kelambanan bertumpu pada anggapan bahwa seseorang pegawai negeri sipil dapat mempercepat proses yang lambat secara eksogen. *Sand the Wheels Hypothesis* merupakan sebuah konsep pemikiran yang menghubungkan korupsi bersama kualitas lembaga pemerintah sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori ini menganggap korupsi sebagai hal yang merugikan dan korupsi dapat menurunkan tingkat pertumbuhan. *Sand theory* melihat hubungan korupsi dengan pertumbuhan tidak hanya langsung terhadap faktor pertumbuhan ekonomi namun juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Wiennata, 2014). Dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan korupsi dapat menyebabkan peningkatan resiko gagal bayar utang melalui penurunan kemampuan suatu negara dalam mengembalikan pinjaman dan bunga.

2.1.7 Transparansi Fiskal

2.1.7.1 Pengertian Transparansi Fiskal

Kopits dan Craig (1998) mendefinisikan transparansi fiskal sebagai: keterbukaan terhadap publik pada umumnya tentang struktur dan funct pemerintah. niat kebijakan fiskal, akun sektor publik, dan proyeksi (Hameed, 2005). Transparansi fiskal membuat perumusan kebijakan dan pengelolaan risiko fiskal lebih efektif, dan memastikan bahwa pemerintah memberikan informasi yang lebih akurat kepada publik (IMF, 2012). Dalam beberapa studi empiris telah ditemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan akun publik meningkatkan kinerja fiskal dan

keberlanjutan fiskal, serta meningkatkan prospek ekonomi (Kopits & Craig, 1998; Islam, 2006; Alt & Lassen, 2006b; Glennerster & Shin, 2008; Kolstad & Wiig, 2009; Arbatli & Escolano, 2015).

International Budget Partnership dan *World Bank* merupakan lembaga yang mempublikasikan index transparansi fiskal yang dikenal sebagai Open Budget Index (OBI). Pertama kali diluncurkan pada tahun 2006, OBI merupakan instrumen penelitian independen, komparatif, dan berbasis fakta untuk mengukur aspek-aspek penting dari *governance* dan akuntabilitas di suatu negara. Skor OBI menilai akses publik terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah pusat meningkatkan dan membelanjakan sumber daya publik. Skor transparansi 61 (dari 100) atau lebih tinggi menunjukkan suatu negara kemungkinan menerbitkan dokumen yang cukup untuk mendukung pengawasan publik tentang anggaran, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai index maka semakin tinggi transparansi fiskal yang tersedia disuatu negara. Secara rinci, tinggi rendahnya skor transparansi dapat dikelompokkan menjadi lima kesimpulan, yaitu :

Tabel 3. Klasifikasi Transparansi Fiskal

Kategori	Skor	Keterangan
Scant or No Information Available	0 – 20	*Insufficient*
Minimal Information Available	21 – 40	*Insufficient*
Limited Information Available	41 – 60	*Insufficient*
Substantial Information Available	61 – 80	*Sufficient*
Extensive Information Available	81 – 100	*Sufficient*

Sumber : International Budget Partnership, 2022

2.1.7.2 Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*)

Menurut teori *signaling*, sebuah bisnis harus memberikan sinyal terkait kepada pengguna laporan keuangan. Pemerintah dapat dibandingkan dengan pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dalam aplikasi untuk sektor publik. Masyarakat telah mempercayakan pemerintah untuk mengelola kekayaan warganya. Masyarakat harus mendapatkan informasi atau sinyal dari pemerintah agar mereka memiliki kepercayaan yang cukup kepada masyarakat. Saat ini, masih kerap terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah terkait kebijakan publik dan fiskal yang dicanangkan pemerntah. Hal ini disebabkan karena terdapat

asimetri informasi antara pemerintah dan pihak eksternal. Asimetris informasi terjadi karena pihak pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak luar. Teori sinyal menunjukkan bagaimana masalah asimetris informasi tersebut dapat dikurangi dengan memberikan sinyal informasi yang lebih banyak kepada pihak lain (Morris, 1987). Pemerintah akan memberikan sinyal ke masyarakat dengan cara memberikan dokumen terkait pelaporan rancangan dan alokasi dana yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal, dan pengungkapan yang lebih lengkap dan transparan.

Menurut Jogiyanto (2010), dalam mengambil keputusan untuk merespon suatu kebijakan, pihak luar (baik publik maupun swasta) akan mendapatkan sinyal dari informasi yang diberikan sebagai pengumuman. Diharapkan pihak eksternal akan merespon ketika pengumuman diterima jika membawa nilai positif. Pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis dan menilai informasi tersebut sebagai berita baik atau buruk setelah dirilis dan didistribusikan kepada semua pelaku pasar.

2.1.8 *E-Budgeting*

Pada tahun 2003 *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan praktik *e-government* sebagai 'keharusan' bagi badan-badan publik. Munculnya internet dan perkembangan paralel dalam kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data yang terjadi selama tahun 1990-an sangat mempengaruhi cara tata kelola publik dilakukan di seluruh dunia. Satu dekade kemudian, *e-government* telah menjadi konsep yang akrab dan digunakan secara universal dalam praktik pemerintah di seluruh dunia. Hampir seluruh aspek kegiatan pemerintah yang tidak melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembuat kebijakan meyakini bahwa penggunaan TIK membawa manfaat besar bagi administrasi publik baik bagi pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Istilah '*e-budgeting*' digunakan untuk mengatasi aplikasi atau alat teknologi informasi dan komunikasi apa pun yang digunakan untuk mengetahui fungsi, prosedur, atau layanan anggaran di seluruh siklus anggaran (perencanaan, pemrograman, penganggaran, alokasi, kontrol, dan evaluasi sumber daya

keuangan). Secara lebih rinci, *e-budgeting* mencakup tiga profil yang berbeda, yaitu: pertama, terdiri dari digitalisasi prosedur anggaran; yang kedua berkaitan dengan difusi informasi anggaran kepada publik dalam format terbuka (open data); yang ketiga menyangkut penggunaan database informasi anggaran yang kompleks untuk menginformasikan pembuatan kebijakan (big data).

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian yang membahas pengaruh good governance principle terhadap utang publik telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Melalui penelitian tersebut, penulis telah melakukan studi yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian yang sedang ditulis, penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam ringkasan tabel sebagai berikut :

Tabel 4. *Ringkasan Tinjauan Empiris*

	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Waqas Mehmood, Rasidah Mohd-Rashid, Attia Aman-Ullah, Dan Chui Zi Ong (2021)	*Country-Level Institutional Quality and Public Debt: Empirical Evidence from Pakistan*	Variabel : *Voice and accountability, political stability and the absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption,* dan public debt Analisis Regresi Data Panel	*Control of corruption* berpengaruh positif terhadap *public debt.*
2	Putu Kusuma Dewi dan Made Heny Urmila Dewi (2019)	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Cadangan Devisa, dan APBN terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Melalui Impor Tahun 1996-2015	Variabel : Penanaman modal asing, cadangan devisa, pendapatan negara, belanja negara, impor, dan utang luar negeri Analisis Regresi Data *Time Series*	Belanja negara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap utang luar negeri
3	Tarek Ben Ali, Ben Abdul Aziz Al Yahya, dan Bandar (2019)	*The Effect of Governance on Public Debt: An Empirical Investigation for The Arabian Gulf Countries*	Variabel : *Voice and accountability, political stability and the absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of*	*Control of corruption* berpengaruh negatif terhadap utang publik

	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
			corruption, dan *public debt* Analisis Regresi Data Panel	
4	Gabriel Caldas Montes, Júlio Cesar Albuquerque Bastos, dan Ana Jordânia de Oliveira (2018)	*Fiscal Transparency, Government Effectiveness and Government Spending Efficiency: Some International Evidence Based on Panel Data Approach*	Variabel : Transparansi fiskal, *control of corruption*, globalisasi, pengeluaran pemerintah, dan *public debt* Analisis Regresi Data Panel	Transparansi fiskal dan korupsi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap utang publik
5	Rizki Nur Amaliah (2018)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Periode 1987 – 2016	Variabel : Produk Domestik Bruto, defisit angaran, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri *Partial Adjustment Model* (PAM)	Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap utang luar negeri
6	Yogie Dahlly Saputro dan Aris Soelistyo (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Di Indonesia	Variabel: defisit anggaran, cadangan devisa, ekspor neto, dan utang luar negeri tahun sebelumnya Analisis Regresi Data *Time Series*	Utang luar negeri tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap uatng luar negeri di Indonesia
7	Selvia Inca Devi (2017)	Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran TerhadapUtang Luar Negeri Indonesia	Variabel : Produk Domestik Bruto, defisit angaran, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri Analisis Regresi Data *Time Series*	Belanja pemerintah memiliki pengaruh negatifdan signifikan terhadap utang luar negeri di Indonesia
8	Arusha Cooray, Ratbek Dzhumashev, dan Friedrich Schneider (2016)	*How Does Corruption Affect Public Debt? An Empirical Analysis*	Variabel: *Corruption Index Kaufmann et al, Corruption Perceptions Index TI, Shadow economy*, dan *Public Debt* Analisis Regresi Data Panel	Peningkatan korupsi menyebabkan peningkatan utang publik

	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
9	Maurice Peat, Jiri Svec, dan Jue Wang (2015)	*The Effects of Fiscal Opacity on Sovereign Credit Spreads*	Variabel: *Sovereign credit risk, fiscal opacity, Open Budget Index,* dan *Sovereign CDS* Analisis Regresi Data Panel	Terdapat hubungan positif nonlinier antara *fiscal opacity* dan *sovereign credit spreads.*
10	Elif Arbatli dan Julio Escolano (2012)	*Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings*	Variabel: *Fiscal Transparency, the average real growth rate, average political fractionalization,* dan *public debt* Analisis Regresi Data Panel	Transparansi fiskal di negara maju memiliki efek signifikan pada rasio utang publik, tetapi sampel lengkap dan sampel negara berkembang, diketahui bahwa efek transparansi fiskal pada utang rendah dan tidak menunjukkan signifikansi statistic
11	I Wayan Gayun Widharma, I Made Kembar Sri Budhi, dan A A I N Marhaeni (2012)	Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Kajian terhadap Faktor-Faktor Yang Berpengaruh	*Indirect tax revenues, the budget deficit on foreign debt, development expenditure, dollar exchange rate, foreign debt a year earlier,* dan *government's foreign debt* Analisis Regresi Data *Time Series*	Utang luar negeri pemerintah tahun sebelumnya menjadi variabel yang memilki pengaruh langsung dan pengaruh total paling dominan terhadap utang luar negeri pemerintah

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram/grafik yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini:

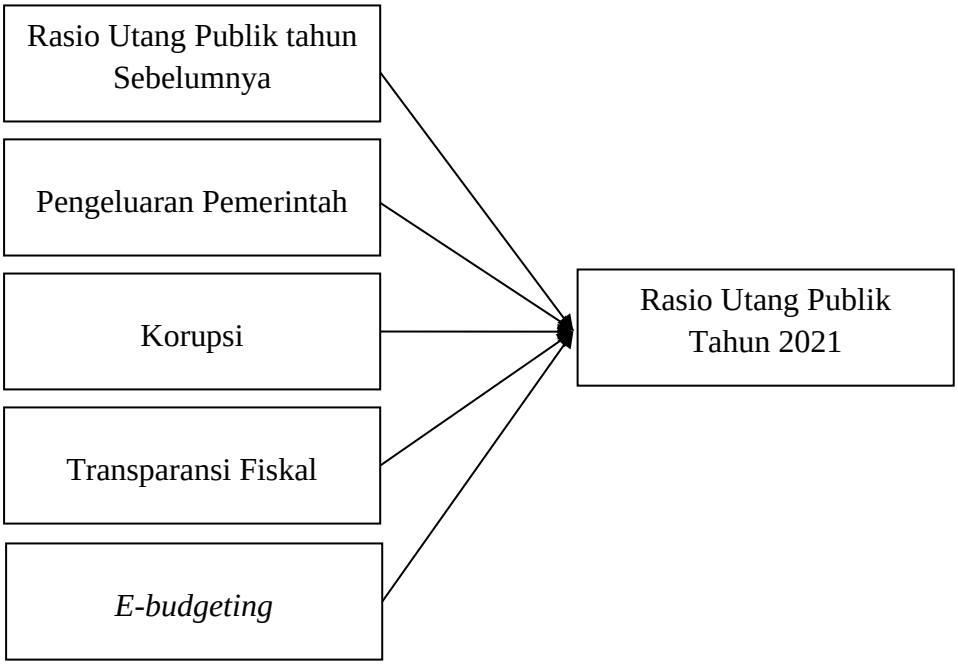

Gambar 10. Kerangka Pemikiran.

Fokus penelitian ini adalah terkait pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal, dan *e-budgeting* rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah yang diklasifikasikan oleh *World Bank* tahun 2021. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widharma et al. (2012) dan Saputro & Soelistyo (2017) memaparkan adanya pengaruh signifikan antara utang pada tahun sebelumnya dengan utang pada tahun berjalan. Secara sederhana, akumulasi utang pada tahun sebelumnya dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan baru melalui utang berikut dengan bunga pinjaman atau yang sering dikatakan sebagai kebijakan menutup utang pada tahun sebelumnya melalui utang baru. Disisi lain, utang publik dianggap sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Jika pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak dan sumber-sumber lain tidak memadai untuk menutupi pengeluaran pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan pinjaman. Dalam hal ini, jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka dapat menyebabkan pinjaman publik yang lebih tinggi untuk kembali membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam publikasi International Monetary Fund (2001) memaparkan bahwa kelemahan pada tata kelola pemerintah (*good governance*) dapat berdampak terhadap efisiensi peran pemerintah dan berpengaruh terhadap terjadinya krisis

global yang terjadi beberapa tahun silam. Dampak dari kelemahan tata kelola dapat terbagi menjadi dua saluran, yaitu saluran pertama tidak langsung dan bekerja melalui utang publik. Sedangkan saluran kedua adalah efek langsung yang berpengaruh terhadap efektivitas pemerintah dan efisiensi pengeluaran pemerintah setelah transparansi meningkatkan akuntabilitas dan dengan demikian tugas alokasi sumber daya. Pada penelitian ini akan membahas pengaruh good governance melalui saluran tidak langsung. Penggunaan *e-budgeting* pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah penambahan aspek teknologi dalam tata kelola pemerintah turut memiliki dampak terhadap utang publik.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan studi empiris, hipotesis sementara penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

H_1 : Diduga rasio utang publik tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021.

H_2 : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021.

H_3 : Diduga korupsi berpengaruh negatif terhadap rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021.

H_4 : Diduga transparansi fiskal berpengaruh negatif terhadap rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021.

H_5 : Diduga *e-budgeting* berpengaruh negatif terhadap rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021.

H_6 : Diduga rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting*secara simultan berpengaruh terhadap rasio utang publik di 55 Negara Berpendapatan Menengah tahun 2021

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang dipublikasikan oleh *International Budget Partnership, International Monetary Fund,* dan *World Bank.* Pada penelitian ini menggunakan raiso utang publik sebagai variabel terikat dan rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting*sebagai variabel bebas.

Tabel 5. Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
Debt Ratio to PDB	DEBT	Persen	*IMF*
Debt Ratio to PDB years ealier	$DEBT_{t-1}$	Persen	*IMF*
Government Expenditure	EXPAND	Persen	*World Bank*
Transparency Fiscal	TRANS	Indeks	*International Budget Partnership*
Corruption	CORR	Indeks	*Transparency International*
E-Budgeting	EBDG	Dummy	*Government Official Website*

Ruang lingkup penelitian mencakup 55 negara-negara berpendapatan menengah (*Middle Income*) yang terdiri dari 37 negara *lower middle-income* (Algeria, Bangladesh, Benin, Bolivia, Cambodia, Cameroon, China, Comoros, Côte d'Ivoire, Egypt, El Salvador, Eswatini, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Lesotho, Morocco, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Romania, São Tomé e Príncipe, Senegal, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Ukraine, Vietnam, dan Zimbabwe) dan 26 negara *upper-middle income* (Argentina, Brazil, Jordan, Iraq, Albania, Dominican Republic, South Africa, Malaysia, Costa Rica, Namibia, Colombia, Armenia, Fiji, Ecuador, Mexico, Georgia, Serbia, Macedonia, Equatorial Guinea, Turkey, Paraguay, Moldova, Bosnia-Herzegovina, Peru, Guatemala, dan Kazakhstan)

dengan tahun pengamatan yaitu 2021. Negara-negara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan negara yang memenuhi seluruh data-data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah analisis data *cross section*.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan topik yang diamati dan diuji (Putranto, 2020). Definisi operasional variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. Rasio Utang Publik

Menurut European Commission (2021), mendefinisikan utang publik sebagai nilai nominal dari total utang kotor yang terutang pada akhir tahun dan dikonsolidasikan antara dan di dalam subsektor pemerintah. Pada penelitian ini, indikator utang publik adalah berupa rasio utang publik adalah metrik yang membandingkan utang publik suatu negara dengan PDB; yaitu dengan membandingkan apa yang dimiliki suatu negara dengan apa yang dihasilkannya, rasio utang publik menunjukkan bahwa kemampuan negara tertentu untuk membayar kembali utangnya. Semakin tinggi nilai rasio utang publik, maka semakin tinggi resiko ketidakmampuan suatu negara dalam mengembalikan kewajiban. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio maka semakin rendah resiko suatu negara dalam pengembalian kewajiban. Data berupa data *General Government Gross Debt* (% of PDB) di negara-negara *middle-income* dan bersumber dari publikasi *World Economic Outlook.*

3.2.2. Pengeluaran Pemerintah

General government final consumption expenditure merupakan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara umum (sebelumnya konsumsi pemerintah umum) mencakup semua pengeluaran pemerintah saat ini untuk pembelian barang dan jasa (termasuk kompensasi karyawan), dan mencakup sebagian besar pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan nasional, tetapi tidak termasuk pengeluaran militer pemerintah yang merupakan bagian dari pembentukan modal pemerintah (World Bank, 2022b). OECD (2021) pengeluaran umum pemerintah

publik dan per-kapita memberikan indikasi ukuran pemerintah di seluruh negara. Namun, variasi besar dalam rasio ini menyoroti pendekatan yang berbeda untuk mengirimkan barang dan jasa publik dan memberikan perlindungan sosial, belum tentu perbedaan sumber daya yang dihabiskan. Misalnya, jika dukungan diberikan melalui keringanan pajak daripada pengeluaran langsung, rasio pengeluaran/PDB secara alami akan lebih rendah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ukuran pengeluaran tidak mencerminkan efisiensi atau produktivitas pemerintah

3.2.3. Korupsi

World Bank dan IMF mendefinisikan korupsi sebagai define "*the abuse of public office for private gains*". Pada penelitian ini, variabel korupsi diukur dengan indeks presepsi korupsi yang dipublikasi oleh *Transparency International*. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indeks yang memberi peringkat negara-negara berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan, sebagaimana ditentukan oleh penilaian ahli dan survei opini. Skala yang digunakan adalah 0 – 100, semakin mendekati 100 mengartikan bahwa tingkat korupsi pada negara tersebut semakin rendah. Begitupula sebaliknya, semakin mendekati 0 mengartikan bahwa tingkat korupsi yang terjadi semakin tinggi.

3.2.4. Transparansi Fiskal

Transparansi fiskal adalah ketersediaan publik terhadap dokumen terkait anggaran, yang secara bersama-sama memberikan pandangan lengkap tentang bagaimana sumber daya publik telah ditingkatkan, direncanakan, dan dihabiskan selama tahun anggaran (International Budget Partnership, 2021). *Open Budget Index* (OBI) merupakan hasil survei didasarkan pada kuesioner dari 228 pertanyaan yang diselesaikan oleh para peneliti yang biasanya berbasis di negara yang disurvei. Hampir semua peneliti berasal dari organisasi masyarakat sipil (yang sebagian besar memiliki fokus yang signifikan pada masalah anggaran) atau lembaga akademik. Nilai OBI yang semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi fiskal di suatu negara, begitu pula sebaliknya semakin mendekati 0 maka semakin rendah transparansi fiskal di negara tersebut.

3.2.5. *E-Budgeting*

E-Budgeting merupakan upaya pemanfaatan teknologi dalam membentuk suatu sistem penyusunan anggaran yang mencakup aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja (Khoirunnisak et al., 2017). Pada penelitian ini, variabel *e-budgeting* diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana bernilai 1 apabila negara tersebut telah menerapkan *e-budgeting* dan 0 jika negara belum menerapkan *e-budgeting*.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai ialah analisis regresi berganda, dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode OLS digunakan untuk mencari nilai residual paling kecil. OLS yang dikenal sebagai metode Gaussian ialah landasan utama dalam teori ekonometrika. Metode OLS dibangun berdasarkan sepuluh asumsi, berikut adalah sepuluh asumsi tersebut.

1. Korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier dalam paremeter.
2. Nilai variabel bebas tidak acak atau tidak *random.*
3. Rata-rata dari variabel gangguan e_i adalah nol (0).
4. Varian dari variabel gangguan e_i adalah sama (heteroskedastisitas).
5. Tidak ada serial hubungan antara gangguan e_i atau gangguan e_i tidak saling berhubungan dengan e_i yang lain.
6. Variabel gangguan e_i berdistribusi normal.
7. Kuantitas paramter harus lebih kecil dibanding kuantitas observasi (n) untuk diestimasi.
8. Variabilitas dalam nilai variabel bebas.
9. Model regresi tidak bias.
10. Tidak terdapat multikolinieritas sempurna.

Untuk menganalisis rasio utang publik yang dipengaruhi oleh rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting*maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

$DEBT = f\,(DEBT_{t-1}, TRANS, CORR, E\text{-}BUDG)$……(1)

Dari formulasi (1), maka model OLS penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DEBT_i = \beta_0 + \beta_1 DEBT_{t-1i} + \beta_2 EXPAND_{t-1i} - \beta_3 CORR_i - \beta_4 TRANS_i - \beta_5 EBUDGi + \mu_I \ldots\ldots (2)$$

dimana:

DEBT	=	Rasio Utang Publik (% PDB)
$DEBT_{t-1}$	=	Rasio Utang Publik Tahun Sebelumnya (% PDB)
EXPAND	=	Pengeluaran Pemerintah (% PDB)
CORR	=	Korupsi (Indeks Presepsi Korupsi)
TRANS	=	Transparansi Fiskal (*Open Budget Index*)
EBUDG	=	*E-Budgeting* (dummy, 0 = jika tidak ada, 1 = jika ada)
i	=	1, 2,...n, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross section*)
β_0	=	Konstanta atau *Intercept*
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Koefisien Regresi
μ_{it}	=	*Error Term*

3.4 Prosedur Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap variabel penelitian.

3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan guna melihat normal atau tidak data yang didistribusikan. Asumsi regresi klasik normalitas menggunakan asumsi distribusi probabilitas dari residual bernilai nol (0), tidak berkorelasi, dan memiliki varian yang konstan. Pada penulisan ini akan menggunakan grafik *normal probability plot.* Pada grafik probabilitas normal plot, nilai residual terdistribusi secara normal jika garis atau titik-titik yang menggambarkan daya sesungguhnya akan rapat ke garis diagonalnya. Pada metode ini juga dapat melihat hasil *Jarque – Bera Test* (J – B), jika nilai J-B tidak signifkan (kurang dari dua) maka data berdistribusi normal.

Selain itu juga, jika nilai probababilitas lebih besar (>) dari 5 % maka data terdistibusi normal. Begitupun sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil (<) sama dengan 5% maka data terdistribusi tidak normal.

3.5.4.2 Deteksi Multikolinearitas

Istilah Multikolinieritas pertama kali diciptakan oleh Rahner Frish. Multikolinieritas adalah hubungan linier antar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen pada suatu regresi. Multikolinieritas terdiri dari dua jenis, yakni *Perfect Multicollinearity* (multikolinieritas sempurna) dan *Imerfect Multicollinearity (*multikolinieritas tidak sempurna). Konsekuensi adanya Multikolinieritas dalam suatu model menyebabkan: (1) Estimator masih *Best, Linier, Unbiasted Estimator* (BLUE), namun, estimator OLS memiliki kovarian yang besar. (2) Konfiden interval melebar. Hal ini mengakibatkan pada penerimaan Hipotesis Nol. (3) Akibat pada poin (2) maka *t – ratio* cenderung statistik tidak signifikan mempengaruhi varaibel bebas. Dan (4) Estimator OLS dan *standart error* – nya menjadi sensitif terhadap trasformasi data walaupun trasformasinya kecil.

Terdapat beberapa upaya untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model, yakni sebagai berikut: (1) Nilai R^2 tinggi namun sedikit variabel bebas yang signifikan, (2) Hubungan parsial antar variabel bebas, (3) Regresi auxiliary, (4) Metode deteksi klien, dan (5) *Varians Infaltion Factor* dan *Tolerance.* Dalam penelitian ini digunakan *Varians Infaltion Factor* dan *Tolerance.* Berikut ialah rumus *Varians Infaltion Factor* (VIF):

$$VIF = \frac{1}{(1 - R_i^2)} \quad \text{.....(3)}$$

Semakin tinggi nilai VIF maka diuga ada multikolinieritas dalam model. Berikut adalah ketentuan yang digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya masalah multikolinieritas dalam suatu model.

- Jika VIF > 10 menunjukkan kolineartitas tinggi.
- Jika VIF 5 - 10 menunjukkan kolineartitas sedang.
- Jika VIF 1 -< 5 menunjukkan kolineartitas rendah.

Untuk mengtasi masalah multikolinieritas dapat dilakukan melalui dua cara yakni tanpa perbaikan dan dengan perbaikan. Tanpa perbaikan dilakukan apabila kolinieritas tergolong rendah dan sedang. Dengan perbaikan dilakukan apabila kolinoeritas tinggi (> 10). Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah multikolinieritas dengan perbaikan, yakni: (1) Mengguanaka data panel, (2) Menghilangkan bias variabel dan spesifikasi, dan (3) Trasformasi variabel.

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varians residu tidak konstan. Heteroskedastisitas kerap terjadi pada data *cross section,* tetapi dapat pula terjadai pada data *time series.* Beberapa faktor yang menyebabkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model antara lain proses belajar (*the error – learning models*) manusia, pilihan yang semakin banyak menyebabkan varians semakin tinggi maka kemungkinan besar akan terjadi heteroskedastisitas, dan kesalahan spesifikasi model.

Apabila dalam model terjadi masalah heteroskedastisitas, maka konsekuensinya adalah: (1) Masih liniernya estimator metode OLS, (2) Tidak biasnya estimator metode OLS, dan (3) Varian tidak lagi minimum, hasil estimator tidak lagi *Best Linier Unbiasted Estimator* (BLUE) tetapi hanya *Linier Unbiasted Estimator* (LUE). Hal ini mengakibatkan pada uji – *t* akan cenderung menerima H_0 dan pada uji *F* akan menunjukkan koefisien yang tidak signifikan.

Guna mendeteksi permasalahan heteroskedastisitas dalam model bisa memakai 2 tata cara, ialah prosedur informal serta prosedur resmi. Prosedur informal ialah prosedur yang sangat kilat serta bisa digunakan untuk menguji permasalahan heteroskedastisitas, lewat suatu grafik pola residual. Bila residual membentuk pola tidak tentu hingga tidak terjalin permasalahan heteroskedastisitas. Kebalikannya apabila residual menampilkan pola tertentu hingga hendak terjadai permasalahan heteroskedastisitas. Buat prosedur resmi digunakan metode- metode: (1) Park, (2) Glejser, (3) White, (4) Korelasi Spearman, (5) Gold Feld Quandt, serta (6) Breusch–Pagan. Riset ini hendak memakai prosedur White dalam program Eviews 10. Hasil yang butuh diperhatikan dari tata cara White merupakan niali F dari Obs*R–

Squared. Bila nilai Obs*R– Squared lebih kecil dari nilaiχ2– tabel hingga tidak terdapat heteroskedastisitas pada model.

3.5.4.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan antar varaibel gangguan yang satu dengan varaibel gangguang lainnya (Widarjono, 2018). Masalah autokorelasi kerap terjadi pada data deret waktu, tetapi data *cross section* mungkin juga masalah autokorelasi. Autokorelasi dibedakan menjadi dua yakni otokorelasi murni dan otokorelasi tidak murni. Autokorelasi murni terjadi meskipun model persamaan sudah terspesifikasi dengan benar sementara autokorelasi tidak murni terjadi karena adanya bias spesifikasi yang terjadi karena *omitted variabel bias* ataupun *firs difference* yang salah.

Akibat dari adanya autokorelasi dalam model sama persis dengan konsekuensi adanya masalah heteroskedastisitas. Penyabab autokorelasi yakni: (1) Adanya kelambanan, (2) Adanya bias spesifikasi akibat *ommited variabels*, (3) Adanya bias spesifikasi karena bentuk fungsi yang tidak benar, (4) Adanya fenomena *cobweb*, (5) Adanya *timelag*, (6) Manipulasi data (*smoothing, interpolasi*, dan ekstrapolasi), (7) Adanya trasformasi data, dan (8) Nonstasioneritas.

Untuk mendeteksi model apakah mengandung masalah autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson (DW) dan uji *Breusch – Godfrey Test* (BG) atau uji *Langrange Multiplier* (LM). Apabila menggunakan uji DW maka untuk menentukan daerah keputusan dilakukan dengan melihat *d – test.*

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n}(\hat{e}_{t-}\ \hat{e}_{t-}\ 1)^2}{\sum_{t=1}^{t=n}\hat{e}_t{}^2} \quad \text{.....(4)}$$

Penentuan daerah keputusan uji DW, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

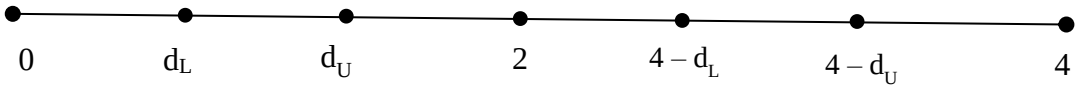

Gambar 11. Daerah Keputusan Uji Durbin Watson (DW)

Ketentuan keputusan:

$0 < d < d_L$	Maka menolak H_0 terdapat autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Maka daerah keragu-raguan, tidak terdapat keputusan
$d_U < d < 4 < d_U$	Maka gagal Menolak H_0, tidak terdapat autokorelasi positif/negatif
$4 - d_U < d < 4 < d_L$	Maka daerah keragu-raguan, tidak terdapat keputusan
$4 - d_L < d < 4$	Maka menolak H_0 terdapat autokorelasi negatif

Melalui uji LM, maka dapat diperoleh dua informasi. Pertama, bagian bawah yang memberi informasi persamaan uji LM yang didasarkan pada lag residual 2 yang didasarkan pada kriteria Akaike dan Schwarz. Kedua, nilai χ^2 - hitung yang diperoleh dari informasi Obs*R – Squared yaitu jumlah observasi dikali dengan koefisien determinasi. Apabila nilai χ^2 – hitung kurang dari χ^2 – kritis maka H_0 ditolak (tidak ada masalah autokorelasi). Selain itu juga, ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada nilai probabilitas Chi Squares. Apabila nilai Chi Squares lebih besar dari $\alpha = 5$ % maka H_0 ditolak.

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat statistik Eviews 10. Dalam menguji hipotesis dilakukan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y (rasio utang publik) dengan variabel independen, yaitu X (rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting*).

3.4.3.1 Uji Signifikan Individu (Uji t)

Untuk mengetahi signifikasi pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan maka uji yang dilakukan adalah uji *t.* Uji *t* untuk penelitian ini adalah:

a. Uji *t* untuk variabel rasio utang publik tahun sebelumnya

   H_0 : $ß_{DEBTt-1} = 0$, Tidak ada pengaruh positif antara rasio utang publik tahun sebelumnya dan utang publik

   H_a : $ß_{DEBTt-1} > 0$, Ada pengaruh positif antara rasio utang publik tahun sebelumnya dan utang public

b. Uji *t* untuk variabel pengeluaran pemerintah

H_0 : $ß_{EXPAND}$ = 0, Tidak ada pengaruh negatif antara pengeluaran pemerintah dan rasio utang publik

H_a : $ß_{EXPAND}$ < 0, Ada pengaruh negatif antara pengeluarn pemerintah dan rasio utang publik

c. Uji *t* untuk variabel korupsi

H_0 : $ß_{CORR}$ = 0, Tidak ada pengaruh negatif antara korupsi dan rasio utang publik

H_a : $ß_{CORR}$ < 0, Ada pengaruh negatif antara korupsi dan rasio utang publik

d. Uji *t* untuk variabel transparansi fiskal

H_0 : $ß_{TRANS}$ = 0, Tidak ada pengaruh negatif antara transparansi fiskal dan rasio utang publik

H_a : $ß_{TRANS}$ < 0, Ada pengaruh negatif antara antara transparansi fiskal dan utang publik

e. Uji *t* untuk variabel *e-budgeting*

H_0 : $ß_{EBUDG}$ = 0, Tidak ada pengaruh positif antara *e-budgeting* dan rasio utang publik

H_a : $ß_{EBUDG}$ < 0, Ada pengaruh negatif antara *e-budgeting* dan rasio utang publik

Pada tingkat signifikansi 5 %, maka kriteria untuk pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Jika *t* – hitung lebih besar (>) dari *t* – tabel maka H_0 ditolak
b. Jika *t* – hitung lebih kecil (<) dari *t* – tabel maka H_0 diterima

Nilai *t* – hitung dapat diketahui melalui hasil regresi Eviews, apabila dihitung secara manual dapat menggunakan formula:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad \text{.....(5)}$$

Keterangan:

t = Nilai *t* - hitung

$\bar{X}$ = Rata-rata sampel

μ = Rata-rata populasi

S = Standard deviasi sampel

n = Banyak sampel

3.4.3.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji *F* digunakanun guna mengenali apakah variabel independen yang dipakai secara simultan/serempak berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji - *F* yang digunakan dalam penelitian adalah:

- H_0 : $ß_{TRANS} = ß_{CORR} = ß_{VA} = ß_{EBUDG} = 0$, Secara bersama-sama variabel independen (transparansi fiskal, korupsi, *voice and accountability*, dan *e-budgeting*) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (utang publik).
- H_a : $ß_{TRANS} \neq ß_{CORR} \neq ß_{VA} \neq ß_{EBUDG} \neq 0$, Secara bersama-sama variabel independen (transparansi fiskal, korupsi, *voice and accountability*, dan *e-budgeting*) berpengaruh terhadap variabel dependen (utang publik).

Pada tingkat signifikansi 5 % dengan pengujian yang dilakukan, maka kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Apabila *F* – hitung lebih kecil (<) dibandingkan *F* tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara simultan variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
b. Apabila *F* – hitung lebih besar (>) dibandingkan *F* tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

Berikut adalah formulasi dari Nilai *F* – hitung.

$$F \text{ – hitung} = \frac{R^2\,(K-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(6)$$

Keterangan:

F = Nilai *F* - hitung

R^2 = R – squared

K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan guna mengukur kebenaran model analisis regresi. Jika nilai R^2 mendekati satu dapat dikatakan terdapat korelasi yang kuat antar variabel bebas dan variabel terikat dan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Widarjono (2018) guna mengukur persentase total variasi terikat yang dijelaskan oleh garis regresi maka digunakan konsep digunakan R^2. Kelemahan dari pengukuran R^2 adalah tidak memperhitungkan derajat bebas, untuk itu digunakan *Adjusted* R^2. Rumus untuk *Adjusted* R^2 adalah sebagai berikut:

$$\textit{Adjusted}\ R^2 = 1 - (1 - R^2)\left(\frac{(n-1)}{n-k}\right) \quad \ldots\ldots(7)$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pengaruh rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting*terhadap rasio utang publik di negara berpendapatan menengah tahun 2021. Sampel penelitian ini adalah 55 negara berpendapatan menengah dengan periode observasi tahun 2021. Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi regresi dan uji signifikansi koefisien variabel secara parsial menunjukkan bahwa rasio utang publik tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021, dimana peningkatan utang pada tahun sebelumnya menciptakan bunga dan pinjaman baru sehingga pemerintah cenderung berutang kembali untuk menutupi atau membayar utang beserta bunga pada utang sebelumnya.
2. Hasil estimasi regresi dan uji signifikansi koefisien variabel secara parsial menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif dapat menyebabkan kebijakan fiskal ekspansif semakin memperdalam pelemahan ekonomi yang terjadi, pandemi COVID-19 yang belum usai menyebabkan pengaruh pengeluaran pemerintah memerlukan waktu untuk sejalan dengan harapan kebijakan yang dapat merangsang kembali proukdtivitas dan konsumsi masyarakat.
3. Hasil estimasi regresi dan uji signifikansi koefisien variabel secara parsial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh positif signifikan publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021. Tingginya tingkat kepercayaan publik

terhadap pemerintah yang tanpa diiringi dengan pengawasan terkait situasi aktual, birokrasi dan adminstari yang kompleks, perbedaan terkait budaya pemberian “hadiah”, dan respon alami atas keterbatasan dan kelambanan merupakan faktor yang mendorong tingkat korupsi yang rendah dapat meningkatkan rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.

4. Hasil estimasi regresi dan uji signifikansi koefisien variabel secara parsial menunjukkan bahwa transparansi fiskal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap rasio utang publik. Ketersediaan dokumen (transparansi fiskal) dapat meningkatkan kepercayaan baik bagi negara pemberi pinjaman maupun investor, adanya transparansi fiskal dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pertanggung jawaban pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan yang dicanangkan.
5. Hasil estimasi regresi dan uji signifikansi koefisien variabel secara parsial menunjukkan bahwa *e-budgeting* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio utang publik. Hambatan terkait ketersediaan sarana dan prasarana mendukung, kemampuan SDM, konflik antar lembaga terkait fungsi *e-budgeting*, dan sistem *e-budgeting* sistem *e-budgeting* yang belum terencana secara matang menyebabkan eksistensi *e-budgeting* di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021 masih cenderung minim, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan, pengembangan, dan pengamanan sistem *e-budgeting* terus berlangsung.
6. Hasil perhitungan uji koefisien regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu rasio utang publik tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah, korupsi, transparansi fiskal dan *e-budgeting* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rasio utang publik di 55 negara berpendapatan menengah tahun 2021.

5.2 Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendorong adanya penelitian-penelitian terkait yang lebih baik. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pengembangan dalam instrumen utang sehingga mendapatkan fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai untuk meminimalisir resiko gagal bayar utang, dengan meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter, pasar modal, dan berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman. Di sisi lain, pinjaman luar negeri dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan prioritas dengan kondisi yang wajar dan alokasi pinjaman di sektor ekonomi produktif sehingga diharapkan dapat menurunkan rasio utang publik dengan meningkatkan PDB.
2. Pengeluaran pemerintah belum dapat secara signifikan menunjukkan pengaruh terhadap rasio utang publik sehingga perlu adanya penelitian dengan periode waktu lebih panjang dengan mempertimbangkan krisis-krisis ekonomi global sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi sehingga dapat diketahui bagaimana dampak pola pengeluaran pemerintah yang dilakukan negara-negara berpendapatan menengah pada masa krisis ekonomi global.
3. Peningkatan pengawasan yang ketat baik dari lembaga terkait maupun masyarakat, penegakkan hukum yang tajam, penyederhaanaan dalam sistem birokrasi, dan perubahan budaya untuk tidak menormalisasi tindakan korupsi perlu dibenahi dan dilaksanakan baik dalam tingkatan pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
4. Ketersediaan dokumen terkait anggaran dapat memberikan informasi posisi fiskal kepada pemerintah yang dapat dimanfaatkan melalui penyusunan rancangan alokasi anggaran untuk menciptakan alokasi anggaran yang lebih efisien dan evaluasi kebijakan sehingga pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapi serta kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Disisi lain, ketersediaan dokumen anggaran yang transparan dapat digunakan menjadi salah satu daya tarik kepada investor untuk menanamkan modal sehingga diharapkan dapat mendorong PDB dan mengurangi rasio utang publik.

5. Fungsi sistem *e-budgeting* yang dicanangkan pada negara berpendapatan menengah belum dapat digambarkan secara signifikan pada jangka waktu satu tahun berjalan, sehingga diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat menggunakan metode komparasi bagaimana rasio utang publik sebelum menggunakan sistem *e-budgeting* dan setelah menggunakan sistem *e-budgeting*
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menunjukkan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio utang publik di negara maju dan negara berkembang pada masa krisis ekonomi global terutama terkait transparansi fiskal dan fungsi penerapan sistem *e-government* dan *e-budgeting*.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Q., Junqing, L., Ramzan, M., & Fatima, S. (2021). Role of governance in debt-growth relationship: Evidence from panel data estimations. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(11), 1–19. https://doi.org/10.3390/su13115954

Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries. *European Economic Review*, *50*(6), 1403–1439. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.04.001

Amaliah, R. N. (2018). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Periode 1987 – 2016*.

Ananda, C. F. (2022). Fenomena Utang dalam Pandemi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. In *Repository Faculty of Economics and Business*.

Arbatli, E., & Escolano, J. (2015). Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings. *Fiscal Studies*, *36*(2), 237–270. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12051

Barro, R. J. (1979). On the Determination of the Public Debt. *Journal of Political Economy*, *87*(5, Part 1), 940–971. https://doi.org/10.1086/260807

Ben Ali, T., & Ben Abdul Aziz Al Yahya, B. (2019). The effect of governance on public debt: an empirical investigation for the Arabian Gulf countries. *Journal of Economic Studies*, *46*(4), 812–841. https://doi.org/10.1108/JES-07-2017-0168

Benfratello, L., Del Monte, A., & Pennacchio, L. (2018). Corruption and public debt: a cross-country analysis. *Applied Economics Letters*, *25*(5), 340–344. https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1321831

Brandy Wine Global. (2016). *The Debt Paradox*.

Brilliyanti, N. F. (2018). *Sistem e-Budgeting*.

Caner, M., Grennes, T., & Koehler-Geib, F. (2010). Finding the Tipping Point: When Sovereign Debt Turns Bad. *Sovereign Debt and the Financial Crisis*, *July*, 63–75. https://doi.org/10.1596/9780821384831_ch03

Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., Zampolli, F., Domanski, D., Drehmann, M., Gambacorta, L., Takáts, E., & Turner, P. (2011). *The real effects of debt*. *352*(352), 25–27. http://www.bis.org/publ/work352.htm

Cooray, A., Dzhumashev, R., & Schneider, F. (2017). How Does Corruption Affect Public Debt? An Empirical Analysis. *World Development*, *90*, 115–127. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.020

Devia, S. I. (2017). Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.

Dewi, P. K., & Dewi, M. H. U. (2019). Pengaruh Penanaman Modal Asing , Cadangan Devisa , Dan Apbn Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Melalui Impor Tahun 1996-2015. *Piramida*, *15*(1), 121–151. https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/55763

DebateWise. (2018). *Benefits of Corruption*. https://debatewise.org/debates/2862-corruption-benefits-of/

Devia, S. I. (2017). Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.

Dewi, P. K., & Dewi, M. H. U. (2019). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Cadangan Devisa , Dan Apbn Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Melalui Impor Tahun 1996-2015. *Piramida*, *15*(1), 121–151. https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/55763

Dome, T. (2003). David Ricardo on Public Debt. In *History of Political Economy* (Vol. 35, Issue 3). https://doi.org/10.1215/00182702-35-3-570

Döring, T., & Oehmke, R. D. (2019). About the Economic Psychology of Public Debt. *Intereconomics*, *54*(5), 297–303. https://doi.org/10.1007/s10272-019-0842-z

Escolano, J., & Arbatli, E. (2012). Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings. In *IMF Working Papers* (Vol. 12, Issue 156). https://doi.org/10.5089/9781475504477.001

European Commission. (2021). *Glossary:Government debt*.

European Parliament. (2015). *Electronic budgeting Innovative approaches to budgeting*.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572796/EPRS_BRI(2015)572796_EN.pdf

Expenditure, P. (n.d.). *Public Expenditure and Participant*. 1–21.

Financeeconomics, P. (2019). Public finance and economics. *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2017*, 64–66. https://doi.org/10.1787/g24ae3d99c-en

Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (2000). Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries. *Journal of Public Economics*, *76*(3), 459–493. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00093-6

Glennerster, R., & Shin, Y. (2008). Does transparency pay? *IMF Staff Papers*, *55*(1), 183–209. https://doi.org/10.1057/palgrave.imfsp.9450028

Gochero, P. (2018). Econometric Analysis of Foreign Direct Investment in the Zimbabwean Mining Sector 2005-2014. *Theoretical Economics Letters*, *08*(14), 3157–3177. https://doi.org/10.4236/tel.2018.814196

Gold, S. (2021). *World Bank: Lack of transparency on debt will hurt economic recovery*.

Hameed, F. (2005). *Fiscal Transparency and Economic Outcomes, by Farhan Hameed; IMF Working Paper 05/225; December 1, 2005*.

Hesda, A. R., & Yuliani, E. (2021). Role of Governance and Public Trust on Government Debt-Economic Growth Nexus (A Global Empirical Analysis). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, *1*(3), 113–132. https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.01

International Monetary Fund. (2001). *Transparency -- An IMF Issues Brief*. https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/042601b.htm

International Monetary Fund. (2012). How Does the IMF Encourage Greater Fiscal Transparency ? *IMF Factsheet*, 2.http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/fiscal.pdf

International Monetary Fund. (2020). The Evolution of Public Debt Vulnerabilities In Lower Income Economies. *Policy Papers*, *20*(003). https://doi.org/10.5089/9781513529110.007

International Monetary Fund. (2022). Making Debt Work For Development and Macroeconomic Stability. *Policy Papers*, *2022*(019), 1. https://doi.org/10.5089/9798400208591.007

International Budget Partnership. (2020). *Open Budget Index*. https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings

International Budget Partnership. (n.d.). *Open Budget Survey | International Budget Partnership*. https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey

Islam, R. (2006). Does more transparency go along with better governance? *Economics and Politics*, *18*(2), 121–167. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00166.x

Ismail, N. I. (2022). *Default Jitters Stalk Egypt, Sending Traders on Wild Ride - Bloomberg*. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-28/default-jitters-stalk-egypt-sending-traders-on-a-wild-ride?leadSource=uverify wall

Jahan, S., Mahmud, A. S., & Papageorgiou, C. (2014). What is Keynesian economics? *Finance and Development*, *51*(3), 53–54.

James E. Alt; David Dreyer Lassen (2006). Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries., 50(6), 0–1439. doi:10.1016/j.euroecorev.2005.04.001

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jogiyanto, H. (2010). Teori portofolio dan analisis investasi. *Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta*.

Kagan, J. (2021). *Debt Overhang*. Invertorpedia. https://www.investopedia.com/terms/d/debtoverhang.asp

Kemoe, L., & Zhan, Z. (2018). Fiscal Transparency, Borrowing Costs, and Foreign Holdings of Sovereign Debt. *IMF Working Papers*, *18*(189), 1. https://doi.org/10.5089/9781484373835.001

Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. D. (2017). Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, *2017*, 249–250. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6715

Kim, E., Ha, Y., & Kim, S. (2017). Public debt, corruption and sustainable economic growth. *Sustainability (Switzerland)*, *9*(3), 1–30. https://doi.org/10.3390/su9030433

Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries? *World Development*, *37*(3), 521–532. https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:wdevel:v:37:y:2009:i:3:p:521-532

Komala, A. R. (2020). E-Budgeting to Enhance the Quality of Information. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities – Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)*, *112*, 190–194. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.044

Kopits, G., & Craig, J. (1998). Transparency in government operations. In *IMF Occasional Papers* (Vol. 1998, Issue 158).

Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency Is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International Political Science Review*, *31*, 301–322. https://doi.org/10.1177/0192512110377602

Lubis, N. K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *1*(2), 124–136.

Mangkoesoebroto, G. (1999). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE.

M. Firmansyah. (2020). Mengenal Pemikiran Old Institutional Economics (OIE) Dalam Ilmu Ekonomi Kelembagaan. Journal of Economics and Business, 6(1), 37 - 46. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i1.39

Mehmood, W., Mohd-Rashid, R., Aman-Ullah, A., & Ong, C. Z. (2021). Country-Level Institutional Quality and Public Debt: Empirical Evidence from Pakistan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *8*(4), 0021–0032. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0021

Montes, G. C., & Paschoal, P. C. (2016). Corruption: what are the effects on government effectiveness? Empirical evidence considering developed and developing countries. *Applied Economics Letters*, *23*(2), 146–150. https://doi.org/10.1080/13504851.2015.1058900

Montes, Gabriel Caldas, Bastos, J. C. A., & de Oliveira, A. J. (2019). Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach. *Economic Modelling*, *79*, 211–225. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.013

Morris, R. D. (1987). Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. *Accounting and Business Research*, *18*(69), 47–56. https://doi.org/10.1080/00014788.1987.9729347

Musgrave, R. (1975). *Richard Musgrave - obituary*. *January*, 18–20.

Nazir, M. U. (2021). Does Corporate Governance Practices Effect on Cost of Debt: Cross-Country Comparison of Pakistan and India. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *16*(2), 187. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p01

OECD. (2011). Government at a Glance 2011. In *Government at a Glance*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264209480-9-en

OECD. (2017). *Trust and Public Policy*. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264268920-en

OECD. (2021). General government - General government spending - OECD Data. In *OECD Data*. https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm

Peat, M., Svec, J., & Wang, J. (2015). The effects of fiscal opacity on sovereign

credit spreads. *Emerging Markets Review*, *24*, 34–45. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ememar.2015.05.001

Peci, B. (2016). Fiscal Transparency in Theory and Practice: the Case of Kosovo. *International Journal of Business & Management*, *IV*(4). https://doi.org/10.20472/bm.2016.4.4.004

Prasetyantoko, A. (2010). *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Penerbit Buku Kompas.

Principles, P. (1958). *REVIEWS A General Theory of Public Debt*. 3–8.

Pribadi, Y. (2016). Studi Utang Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pembiayaan Apbn Tahun 2000-2016. *Jurnal Informasi Kimia Dan Permodelan*, *53*(9), 1689–1699.

Putranto, muhammad noval. (2020). Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja Logistics. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 5.

Radford, A. R. A., & Camp, P. O. W. (1937). London School of Economics The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines Published by : Wiley on behalf of The London School of Economics and Political Science and The Suntory and Toyota International Centres for Econo. *Economica*, *New Series*, *4*(16), 386–405.

Rauch, J. E. (1995). Bureaucracy, Infrastructure, and Economic Growth: Evidence from U.S. Cities during the Progressive Era. *American Economic Review*, *85*(4), 968–979. https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v85y1995i4p968-79.html

Roberts, R. O. (1942). Ricardo's Theory of Public Debts. *Economica*, *9*(35), 257–266. http://www.jstor.org/stable/2549539

Shabtai Gold. (n.d.). *Crippling Debt_ Transparent Lending and Borrowing Must be Part of the Solution - International Budget Partnership*.

Saputra, D., Aimon, H., & Adry, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, *1*(3), 482. https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4989

Saputro, Y. D., & Soelistyo, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *X*, 45–59. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v1i1.5408

Schmied, J., & Freytag, A. (2016). *Debt Relief and Good Governance: New Evidence. econstor*. *November*.

Springborg, R. (2022). *Follow the money to the truth about Sisi's Egypt*. *January*.

Syofyan, S. (2019). Ekonomi Kelembagaan Baru dan Kebijakan Sektor Publik Beberapa Contoh Kasus. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, *1*(1), 1–10.

Teraji, S. (2018). Institutions and the Economics of Behavior I. In *The Cognitive Basis of Institutions*. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-812023-1.00002-8

Tim Kajian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu RI. (2012). *Laporan tim kajian pola krisis ekonomi*. 1–57. https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2013/kajian/pkem/Pola Krisis Ekonomi.pdf

Toporowski, J. (2020). The financial instability hypothesis. *Credit and Crisis from Marx to Minsky*, *74*, 150–158. https://doi.org/10.4337/9781788972154.00022

Torgler, B., Schneider, F., & Macintyre, A. (2011). Shadow economy, voice and accountability, and corruption. *Handbook on the Shadow Economy*, *June 2014*, 469–501. https://doi.org/10.4337/9780857930880.00024

Transparency International. (2021). *How does corruption shape Asia? - News - Transparency.org*. https://www.transparency.org/en/news/how-does-corruption-shape-asia

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). (2021). Good Governance: Definition and Characteristics. https://uclg-aspac.org/en/good-governance-definition-and-characteristics/

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Detecting and Investigating Corruption*. https://grace.unodc.org/grace/academia/module-series-on-anti-corruption.html?lf_id=

Uxó, J., & Álvarez, N. (2019). *The "paradox of debt" or how to avoid austerity again*.

Wibowo, E. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 1–14.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Widharma, I. W. G., Budhi, I. M. K. S., & Marhaeni, A. A. I. N. (2012). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Kajian terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh. *E-Journal Pascasarjana Univ Udayana*, *2*(1), 1–20. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/3206

Wiennata, P. P. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Pada Negara G-20*. *20*, 1–134.

http://eprints.undip.ac.id/43529/1/17_WIENNATA.pdf

World Bank. (2020). Anti-Corruption Fact Sheet. In *Policy Research Working Paper Series*. https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet

World Bank. (2022a). Emerging risks to the recovery. *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*, 49–73. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1730-4_ch1

World Bank. (2022b). Glossary | DataBank. In *The World Bank Group*. https://databank.worldbank.org/metadataglossary/jobs/series/SM.POP.TOTL.ZS%0Ahttps://databank.worldbank.org/metadataglossary/gender-statistics/series/SI.POV.GINI%0Ahttps://databank.worldbank.org/metadataglossary/health-nutrition-and-population-statistics/se

World Bank. (2022c). Greater Transparency on Hidden and Distressed Debt Can Reduce Global Financial Risks and Support Recovery. In *World bank Press release*. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/02/15/greater-transparency-on-hidden-and-distressed-debt-can-reduce-global-financial-risks-and-support-recovery

World Bank_ Lack of transparency on debt will hurt economic recovery _ Devex. (n.d.).

Yaechan, L. (2021). *Debt Relief for Middle-Income Countries: Can the International Community Meet the Moment?* https://www.bu.edu/gdp/2021/06/02/debt-relief-for-middle-income-countries-can-the-international-community-meet-the-moment/